

DISERTASI

**PENGARUH DEMOKRASI EKONOMI DAN DERAJAD
PENGHISAPAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI
INDONESIA**

**AJI SOFYAN EFFENDI
NOMOR POKOK : P0500307027**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

DISERTASI

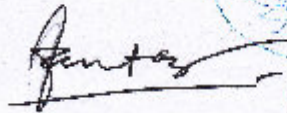
**PENGARUH DEMOKRASI EKONOMI DAN DERAJAT PENGHISAPAN EKONOMI
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

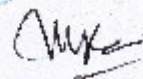
AJI SOFYAN EFFENDI
P0500307027

Telah dipertahankan di depan panitia Promosi Doktor
pada tanggal 15 Maret 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Tim Promotor

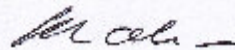


Prof. Dr. I. Made Benyamin, M.Ec
Promotor



Dr. Madris, DPS, SE., M.Si
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3
Ilmu Ekonomi,



Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Mursalim

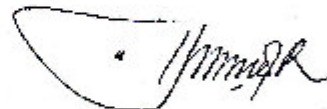
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJI SOFYAN EFFENDI
Nomor Mahasiswa : P0500307027

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Yang menyatakan,



AJI SOFYAN EFFENDI

ABSTRAK

AJI SOFYAN EFFENDI. *Pengaruh Demokrasi dan Derajat Penghisapan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia (dibimbing oleh I Made Benyamin dan Madris).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penerapan demokrasi produksi (DP), demokrasi penguasaan faktor produksi (DPFP), demokrasi alokasi dan konsumsi (DAK), dan derajat penghisapan ekonomi (DPE) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan (2) perbedaan pengaruh DP, DPFP, DAK, DPE, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan bukan penghasil SDA.

Metode penelitian menggunakan data sekunder berupa panel data tahun 2000-2010 dengan populasi daerah penghasil sumber daya alam yang meliputi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Sementara provinsi-provinsi lain merupakan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh signifikan dan bersifat negatif antara DP dan tingkat kemiskinan serta antara DPFP dan tingkat kemiskinan di Indonesia, tetapi terdapat pengaruh signifikan dan bersifat positif antara DAK dan tingkat kemiskinan serta antara DPE dan tingkat kemiskinan di Indonesia, dan (2) melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdapat perbedaan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung antara DP, DPFP, DAK, dan derajat penghisapan sumber daya ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, baik di daerah penghasil SDA maupun di daerah bukan penghasil SDA.

Kata kunci: demokrasi ekonomi, derajat penghisapan sumber daya ekonomi dan kemiskinan



ABSTRACT

AJI SOFYAN EFFENDI. *The Influence of Democracy and Economic Exploitation Degree on Poverty in Indonesia* (supervised by I Made Benyamin and Madris)

The aims of the research are to find out (1) whether the application of Production Democracy, Production Factor Authority Democracy, and Economic Exploitation Degree have direct and indirect influence on the level of poverty in Indonesia. (2) the different influences of production democracy, production factor ownership democracy, allocation and consumption democracy, economic exploitation degree, economic growth, and the absorption of laborers on poverty in the regions which produce natural resources and the ones which do not.

The research used secondary data in the form of data panel from 2000 to 2010. The populations of the regions which produce natural resources were Aceh Nangroe Darussalam Province, Riau Province, South Sumatera Province, East Kalimantan province, and Papua Province, while the ones which do not produce natural resources were other provinces in Indonesia. The data were analyzed using structural equation model (SEM) method.

The results of the research indicate that (1) there is a significant but negative influence of production democracy on the level of poverty in Indonesia, (2) there is a significant but negative influence of production factor ownership democracy on the level of poverty in Indonesia, (3) there is a significant and positive influence of allocation and consumption democracy on the level of poverty in Indonesia, (4) there is a positive and significant influence of exploitation degree of economic resources on the level of poverty in Indonesia. Besides, it is also found the facts that there is direct and indirect different influences of economic growth and the absorption of labors, production democracy, production factor ownership democracy, allocation and consumption democracy, and exploitation degree of economic resources on the level of poverty either in the regions which produce natural resources and the ones which do not.

Key words : economic democracy, exploitation degree of economic resources, poverty



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik yang merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penyelesaian disertasi ini telah banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zamruddin Hazid, SE, SU, selaku rektor Universitas Mulawarman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan jenjang studi program doktor ilmu ekonomi.
2. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, selaku rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi program doktor ilmu ekonomi di Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ir. Mursalim, sebagai direktur program pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhammad Ali, SE, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA selaku Ketua Program studi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan arahan dalam penyelesaian studi Doktor.
6. Prof. Dr. I. Made. Benyamin, M.Ec selaku promotor yang selalu mengarahkan dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Madris, DPS, SE, M.Si selaku ko-promotor yang selalu mengarahkan dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
8. Bapak dan Ibu Penguji, Prof. Dr. A. Karim Saleh, Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec, Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, MA, Prof. Dr. Rahmatia, MA dan Prof. Dr. Muh. Saleh, MS selaku penguji eksternal.
9. Istri dan anak penulis yang dengan setia pendampingi dalam duka dan suka, menopang penulis dengan doa sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan moril dan materil serta

mendoakan keberhasilan penulis.

Penulis sadar disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya senantiasa penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita.

Makassar, 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
RINGKASAN	v
ABSTRACK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	26
A.1. Kemiskinan Dan Demokrasi Ekonomi	26
A.2. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	31
B. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	49
C. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	52
D. Implementasi Demokrasi Ekonomi Indonesia	53
D.1. Peran Pemerintah dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat	63
D.2. Menciptakan Distribusi Demokratis	68
D.3. Strategi Penghapusan Kesenjangan	75
D.4. Realokasi Aset Guna Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat	82
D.5. Dasar Konstitusi Ekonomi Rakyat	90

E. Demokrasi Ekonomi dan Kemiskinan	97
F. Substansi Demokrasi Ekonomi	99
G. Beberapa Studi Empirik Sebelumnya	106

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Konseptual	117
B. Hipotesis Penelitian	128

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	130
B. Lokasi dan Priode Penelitian	130
C. Populasi dan Sampel	131
D. Jenis dan Sumber Data	132
E. Metode Analisis Data	133
F. Definisi Operasional	147

BAB V. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi, Derajat Penghisapan ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan	
A.1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia terkini	155
A.1.2 Garis Kemiskinan	158
A.1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	159
A.1.4 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	161
A.1.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2010	163

A.1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2010	165
A.1.7	Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia Tahun 1999-2010	169
A.2.1	Gambaran Kemiskinan di daerah SDA dan NSDA	176
A.2.2	Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	180
A.2.3	Pertumbuhan Ekonomi Daerah SDA dan NSDA	193
A.2.4	Persentase Penduduk Bekerja	198
A.2.5	PDRB Per Kapita	202
A.2.6	Konsumsi Per Kapita	206
A.2.7	Upah Minimum Propinsi (UMP)	209
A.2.8	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	214
A.2.9	APBD	218
A.2.10	Derajat Otonomi Fiskal (DOF)	223
A.2.11	Indeks Ketimpangan Regional	228
A.2.12	Derajat Penghisapan Sumber Daya Ekonomi	232
B.	Hasil Estimasi Pengaruh Demokrasi Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	236
B.1.	Pengaruh Langsung Demokrasi Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	236
B.2.	Pengaruh Tidak Langsung Demokrasi Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	238
B.3.	Pengaruh Total Demokrasi Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	240
B.4.	Pengaruh Faktor Interaksi Demokrasi Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	242

C. Pengujian Hipotesis 246

BAB VI. PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

A. Analisis dan Implikasi Pengaruh Langsung 250

A.1. Analisis dan Implikasi Pengaruh demokrasi produksi (DP) terhadap tingkat kemiskinan. 250

A.2. Analisis dan Implikasi Pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (DPFP) terhadap Tingkat Kemiskinan 253

A.3. Pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) terhadap kemiskinan 258

A.4. Pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) Terhadap Kemiskinan 259

B. Analisis dan Implikasi Pengaruh Tidak Langsung
264

B.1. Analisis dan Implikasi Pengaruh Tidak Langsung Demokrasi Produksi (DP) Terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 264

B.2. Analisis dan Implikasi Pengaruh Tidak Langsung Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 266

B.3. Pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 268

B.4. Pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) Terhadap Tingkat Kemiskinan melalui

	12
Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	269
C. Analisis dan Implikasi Pengaruh Total	271
C.1. Analisis dan Implikasi Pengaruh Total Demokrasi Produksi Terhadap Tingkat Kemiskinan	271
C.2. Analisis dan Implikasi Pengaruh Total Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi Terhadap Kemiskinan	272
C.3. Analisis dan Implikasi Pengaruh Total Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan	274
C.4. Analisis dan Implikasi Pengaruh Total Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) Terhadap Tingkat Kemiskinan	276
D. Analisis dan Implikasi Pengaruh Faktor interaksi	278
D.1. Analisis dan Implikasi Perbedaan Pengaruh Demokrasi Produksi Terhadap Tingkat Kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan bukan penghasil sumber daya alam (NSDA)	278
D.2. Analisis dan Implikasi Perbedaan Pengaruh Pemilikan Faktor Produksi Terhadap Tingkat Kemiskinan Antara Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) Dan Bukan Penghasil Sumber Daya Alam (NSDA)	278
D.3. Analisis dan Implikasi Perbedaan Pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Antara Daerah Penghasil SDA dan NSDA	279

D.4. Analisis dan Implikasi Perbedaan Pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Antara Daerah Penghasil SDA dan NSDA	279
D.5. Analisis dan Implikasi Perbedaan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Antara Daerah Penghasil SDA dan NSDA	280
D.6. Analisis dan Implikasi Perbedaan Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Antara Daerah Penghasil SDA dan NSDA	280
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	283
A. Kesimpulan	283
B. Saran-Saran	285
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. PDRB per Kapita (dalam Ribu Rp) Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2000 – 2010	6
Tabel 1.2. Konsumsi per kapita (dalam Ribu Rp) Tahun 2000 – 2010	6
Tabel 1.3. Indikator Kesejahteraan	10
Tabel 1.4. Perbandingan Indikator Ekonomi	12
Tabel 1.5. Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia	21
Tabel 2.1. Simulasi Penurunan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Ketidakmerataan (Gini) yang berbeda hingga 2010	111
Tabel 4.1. Nilai Skor Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia Putaran II	134
Tabel 4.2. Uji Goodness of Fit	136
Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	157
Tabel 5.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah	159
Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	160
Tabel 5.4. Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	162
Tabel 5.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah	164
Tabel 5.6. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah	166
Tabel 5.7. Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah	168
Tabel 5.8. Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah	169
Tabel 5.9. Indkes L di Indonesia menurut Daerah	170
Tabel 5.10. Distribusi Pengeluaran Daerah	174
Tabel 5.11. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	178
Tabel 5.12. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha	180
Tabel 5.13. Laju Pertumbuhan PDB	183

Tabel 5.14. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha	185
Tabel 5.15. Nilai PDB Menurut Penggunaan	187
Tabel 5.16. Laju Pertumbuhan PDB Triwulan	188
Tabel 5.17. Struktur PDB Tahun 2009-2011	189
Tabel 5.18. PDB dan PNB per Kapita Tahun 2009-2011	190
Tabel 5.19. Peranan Wilayah Dalam Pembentukan PDB Nasional	191
Tabel 5.20. Peranan Wilayah Menurut Kelompok Triwulan	192
Tabel 5.21. Pertumbuhan Ekonomi Daerah SDA dan Daerah Non SDA	196
Tabel 5.22. Persentase Penduduk Bekerja Tahun 2000-2010	200
Tabel 5.23. PDRB Perkapita Daerah SDA dan NSDA	204
Tabel 5.24. Konsumsi Perkapita Daerah Penghasil SDA dan NSDA	207
Tabel 5.25. Upah Minimum Provinsi Daerah Penghasil SDA dan NSDA	212
Tabel 5.26. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Penghasil SDA dan NSDA	216
Tabel 5.27. APBD Daerah Penghasil SDA dan NSDA	221
Tabel 5.28. DOF Daerah Penghasil SDA dan NSDA	226
Tabel 5.29. Indeks Ketimpangan Regional Daerah SDA dan NSDA	230
Tabel 5.30. Indeks Derajat Penghisapan Sumber Daya Ekonomi Daerah SDA dan NSDA	234
Tabel 5.31. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Antar Variabel	237
Tabel 5.32. Pengaruh Tidak Langsung	239
Tabel 5.33. Pengaruh Total	241
Tabel 5.34. Pengaruh Faktor Interaksi Daerah SDA dan NSDA	243

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Model SEM	127
Gambar 5.1. Jumlah Prosentase Penduduk Miskin	155
Gambar 5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia	164
Gambar 5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia	166
Gambar 5.4. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011	182
Gambar 5.5. Hasil Estimasi Model SEM	245

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan, adalah persoalan dunia dan persoalan umat manusia, berbagai macam penelitian dan studi sudah dilakukan baik oleh kalangan ilmuwan maupun kalangan lainnya para praktisi, politisi, LSM dan berbagai elemen kemasyarakatan lainnya yang mempunyai empathy terhadap kemiskinan, berbagai macam faktor penyebab kemiskinan telah diketemukan, namun sebegitu jauh persoalan kemiskinan bukannya semakin berkurang namun ada kecenderungan justru terjadi peningkatan, ada pola persamaan dalam melihat persoalan kemiskinan di dunia termasuk di Indonesia yaitu terletak pada Persoalan demokrasi ekonomi dan derajat penghisapan sumber daya ekonomi yang terjadi di suatu negara, negara yang dimana penerapan demokrasi ekonominya buruk dan derajat penghisapan sumber daya ekonominya tinggi, umumnya terjadi di negara-negara yang memiliki sumber daya alam, ternyata memiliki kantong-kantong kemiskinan yang juga tinggi.

Beberapa contoh negara di dunia yang walaupun tidak memiliki sumber daya alam (SDA) seperti Jepang, Taiwan, Singapura, Hongkong, dan beberapa negara Asia Pasifik dan Eropa, telah menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan modal sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi negara-negara tersebut diatas tumbuh menjadi raksasa ekonomi dan mampu menjadi stabilisator ekonomi di kawasan Asia-Pacifik, minimnya modal sumber daya alam (SDA) tidak menjadi penghambat untuk negara ini menjadi makmur dan sejahtera.

Contoh konkrit lainnya adalah dominasi Amerika Serikan (AS) mengungguli Uni Soviet dalam banyak hal termasuk ekonomi, padahal kedua Negara tersebut praktis sama dalam hal SDA dan SDM dan sama-sama memulai industrialisasi menjelang akhir abad ke 19, bahkan Uni Soviet memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat penting yaitu minyak dan gas bumi dalam volume dan kualitas yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Tetapi keadaan membuktikan sekarang ini dimana Amerika Serikat telah mendominasi sebagai "kekuatan tunggal" ekonomi dunia. Dengan kombinasi antara kekuatan sumber daya manusia, teknologi, militer dan sumber daya alamnya, Amerika telah mampu mendikte untuk membawa keadaan perekonomian dunia dewasa ini, sesuai dengan yang diinginkannya.

Sejak tahun 1966, perekonomian Indonesia berubah total dari perekonomian orde lama, era Soeharto pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistim ekonomi pasar bebas atau yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi liberal diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi nasional, pemerintah orde baru

menjalin kembali hubungan dengan dunia barat / internasional yang sempat terputus saat pemerintahan orde lama. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan lembaga-lembaga ekonomi dunia lainnya seperti IMF, WB, ADB, IGGI, CGI dan lain-lain.

Inilah awalnya, dimana bantuan asing dan hutang luar negeri menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya telah menjadi bumerang bagi bangsa ini di era Soeharto lengser. Dan bangsa Indonesia masuk ke masa transisi melalui era reformasi. Ratusan triliun rupiah, hutang Asing masih belum terlunasi yang menjadi warisan abadi, siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini kedepan.

Selain itu, sejak dekade 80-an perekonomian Indonesia mengalami suatu pergeseran kearah yang lebih liberal berbarengan dengan berubahnya peran pemerintah pusat dari sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi, sosial dan politik ke peran lebih sebagai fasilitator pihak swasta dan asing. Terutama dari segi administrasi dan regulasi sedangkan peran swasta meningkat pesat, pergeseran ekonomi Indonesia ini didorong oleh sejumlah paket deregulasi yang diawali dengan deregulasi sistim perbankan pada tahun 1983 dan deregulasi perdagangan pada tahun 1984.

Paket-paket tersebut harus dilaksanakan pemerintah orde baru karena sesuai dari keinginan Negara pendonor, Bank Dunia, dan IMF yang dikenal dengan sebutan "*Washington Consensus*". Karena ekonomi Indonesia pada masa orde baru tersebut semakin tergantung dengan

"Pemodal asing dan pinjaman luar negeri", maka tidak ada pilihan lain selain melaksanakan consensus Washington tersebut. Sehingga pintu kearah terbukanya perusahaan asing di Indonesia untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan nasional berupa sumber daya alam (SDA) sangat terbuka lebar yang ironisnya sampai sekarang ini tidak dapat dihentikan atau dikurangi sedikitpun.

Di sisi lain Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dalam struktur ekonomi dan penerimaan negara, mayoritas masih mengandalkan pendapatan dari eksplorasi sumber daya alam (SDA) tersebut, yang sesungguhnya jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, maka dapat di prediksi perekonomian Indonesia akan terpuruk dan tidak berkelanjutan (*sustainable growth*) karena sifatnya yang non *Renewable Resources* (sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui).

Gambaran kuantitatif berikut ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada beberapa propinsi saat ini yang memiliki sumber daya alam (SDA) yaitu **Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Sumatera Selatan, Kaltim dan Papua**. Dimana kita telah mengetahui bahwa propinsi tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam menginjeksi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa dasa warsa terakhir ini.

Dengan PDRB ratusan trilliun, daerah ini tumbuh sebagai daerah harapan masa depan Indonesia, namun disisi lain, adalah hal ironis dimana terlihat bahwa daerah ini juga ternyata juga masih relative

terkebelakang baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan public, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang juga tinggi serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang belum memadai.

Disisi lain ada juga propinsi yang tidak berbasis sumber daya alam (non SDA) yaitu Propinsi selain Propinsi penghasil SDA tersebut diatas seperti **DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI. Jogjakarta. Propinsi yang berada di Pulau Sulawesi, Sumatera,** dan lain-lain, Yang telah kita ketahui, ternyata telah tumbuh perekonomiannya dengan pesat, infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang memadai dan tingkat kemiskinan yang lebih kecil telah mengindikasikan bahwa kesejahteraan daerah yang berbasis non sumber daya alam ini relatif lebih baik dengan jumlah penduduk yang sangat besar daerah ini telah mampu menciptakan "nilai tambah" melalui sektor industri (termasuk home industry) yang mempunyai multiplier effect yang sangat besar. Gambaran perekonomian dari 2 kelompok daerah ini terlihat dari besaran PDRB per kapita.

Gambaran tabel dibawah ini menunjukkan PDRB per kapita dari dua kelompok daerah yang berbasis sumber daya alam dan non sumber daya alam, sebagai berikut :

Tabel 1.1 : PDRB per Kapita (dalam Ribu Rp) Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2000 – 2010.

Rata-rata PDRB		
1	Total Rata-rata Daerah SDA	27.176.975
2	Total Rata-rata Daerah Non SDA	10.567.116

Sumber data : BPS Jakarta, 2012.

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa rata-rata PDRB perkapita daerah yang berbasis SDA lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang non SDA sebesar Rp. 27,2 Juta dan Rp. 10,5 Juta, logika ekonomi menjelaskan semestinya distribusi pendapatan dan pendapatan per kapita di daerah SDA juga dapat lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah non SDA yang pada gilirannya kesejahteraannya juga menjadi lebih tinggi. Namun fakta telah menunjukkan keadaan sebaliknya dimana tingkat kesejahteraan daerah yang berbasis SDA ini ternyata masih rendah.

PDRB per kapita yang tinggi ternyata tidak menetes kebawah dalam bentuk konsumsi rill per kapita yang semestinya dirasakan oleh masyarakat daerah SDA tersebut, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 : Konsumsi per kapita (dalam Ribu Rp) Tahun 2000 - 2010

Rata-rata Konsumsi Perkapita		
1	Total Rata-rata Daerah SDA	6.469.229
2	Total Rata-rata Daerah Non SDA	7.784.556

Sumber data : BPS Jakarta, 2012.

Tabel 1.1 dan 1.2 tersebut menunjukkan rata-rata PDRB per kapita

daerah yang berbasis SDA adalah sebesar Rp. 27,2 Juta sementara daerah yang non SDA adalah sebesar Rp. 10,5 Juta, sementara besaran konsumsi rata-rata daerah SDA adalah hanya sebesar Rp. 6,46 Juta dan daerah non SDA adalah Rp. 7,78 Juta.

Selain dari sisi konsumsi, keadaan yang sama juga terlihat dari sisi saving, dimana dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005 sampai 2010 terlihat bahwa rata-rata tabungan dari daerah yang berbasis SDA hanyalah sebesar Rp. 20,350 Milyar sedangkan rata-rata tabungan daerah yang berbasis non SDA adalah sebesar Rp. 186,931 Milyar atau sembilan kali lipat kemampuan tabungan daerah yang berbasis SDA.

Sebagai akibat lanjutan atau efek domino dari kecilnya konsumsi perkapita serta tingkat saving tersebut maka dalam skala yang lebih luas adalah tingginya tingkat pengangguran di daerah yang kaya akan sumber daya alam tersebut, yang mencapai angka rata 11, 1 %.

Kalau kita membandingkan dalam beberapa tahun terakhir, ternyata terlihat bahwa tingkat pengangguran di daerah yang berbasis SDA adalah lebih tinggi bila dibandingkan dengan non SDA. Hal ini dapat terjadi karena daerah yang berbasis SDA dalam membentuk pertumbuhan ekonominya lebih bersifat kapital intensif sehingga value addednya kecil, lapangan pekerjaan yang tersedia dengan tipikal daerah seperti ini membutuhkan pekerja dengan SDM dan keahlian khusus yang sulit untuk tersedia di daerah, sementara itu SDM daerah yang tersedia masih belum optimal. Bahkan ada 4 propinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di

Indonesia tahun 2011 dimana Kalimantan Timur termasuk di dalamnya, yaitu sebesar 11,41%, Banten 14,15%, Sulawesi Utara 12,35% dan Jawa Barat 12,28 %.

Dapat diduga, dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi tersebut maka fenomena ekonomi lain yang muncul adalah tingginya prosentase penduduk miskin di daerah SDA yang mencapai 21,32 % sementara di daerah non SDA hanya mencapai angka 17,11 %.

Kenyataan tersebut diatas memang cukup membuat kita miris dan prihatin. Bagaimana tidak, rata-rata penduduk miskin dari daerah yang kaya SDA ternyata lebih tinggi dari daerah yang tidak dianggap kaya, angka ini telah mengindikasikan kegagalan pertumbuhan ekonomi yang di back up dengan sumber daya alam ternyata resisten dengan tingkat kemiskinan yang cenderung semakin tinggi.

Dua daerah kaya sumber daya alam yaitu Papua dan NAD menunjukkan angka yang sangat tinggi penduduk miskinnya yaitu sebesar 39,40% dan 27,67% dari perspektif politik dan keamanan, kita dapat melihat bahwa kedua daerah tersebut, kemiskinan dan kegagalan pembangunan akan menimbulkan potensi disintegrasi dan gangguan keamanan yang berpotensi untuk pecahnya NKRI seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Warisan orde baru yang memarginalkan daerah kaya sumber daya alam dalam orientasi pembangunan nasional semestinya dapat dihindari di era reformasi ini sehingga platform pembangunan ekonomi di daerah yang berbasis sumber daya alam dapat lebih di

fokuskan mengingat kontribusinya juga sangat tinggi dalam membentuk pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi tidak bermanfaat manakala kemiskinan juga semakin meningkat.

Selanjutnya kalau kita melihat hakekat pembangunan sesungguhnya adalah tercapainya kesejahteraan suatu masyarakat. Masyarakat yang sejahtera tentunya akan mencapai masyarakat yang makmur, sebaliknya masyarakat yang tidak sejahtera maka akan tidak tercapai kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tersebut itulah maka serangkaian program pembangunan dibuat oleh pemerintah secara berkesinambungan, namun apabila tingkat kesejahteraan dan kemakmuran tidak tercapai maka kita dapat mempertanyakan kenapa program pembangunan tersebut gagal.

Berikut ini gambaran kuantitatif indikator kesejahteraan di Indonesia dari daerah yang berbasis SDA dan non SDA yang meliputi angka kematian bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH), index pembangunan manusia (IPM), serta indikator sosial yang meliputi rumah tangga yang mempergunakan air bersih dan rumah tangga yang mempergunakan jaringan listrik PLN.

Tabel 1.3. Indikator Kesejahteraan daerah SDA dan NSDA tahun 2000-2010.

Daerah	AKB	AHH	IPM	RTdg listrik(%)	RTdg air bersih (%)
SDA	26,10	70,88	71,0	67,57	22,61
NSDA	18,08	73,05	72,67	98,04	19,46

Sumber : BPS, Jakarta 2012, diolah penulis.

Dari tabel indikator kesejahteraan tersebut, terlihat bahwa di propinsi yang berbasis penghasil SDA indikator angka kematian bayi (AKB) lebih tinggi bila dibandingkan dengan propinsi yang berbasis bukan penghasil SDA, dalam kurun waktu 2000 – 2010 yaitu dengan rata-rata 26,10 di daerah SDA dan 18,08.

Selain itu, angka harapan hidup (AHH) di daerah yang berbasis SDA juga jauh lebih rendah yaitu 70,88 dan 73,05 untuk daerah non SDA, begitu pula dengan index pembangunan manusia (IPM) yaitu 71,0 lebih rendah, bila dibandingkan dengan daerah non SDA yang sudah mencapai 72,67, hal tersebut yang menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), sedangkan yang menyangkut standard pelayanan minimum (SPM), yaitu yang menyangkut rumah tangga yang memiliki jaringan air bersih (PDAM) relatif lebih baik di daerah yang berbasis SDA yaitu 22,61% sedangkan daerah yang berbasis non SDA adalah sebesar 19,46%, ini menunjukkan peran pemerintah daerah khususnya PDAM menunjukkan kontribusi yang belum baik, karena rata-rata secara

keseluruhan masih belum optimal yaitu masih dibawah 50% dari jumlah penduduk. Sedangkan untuk rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, daerah yang berbasis SDA, masih tertinggal jauh yaitu hanya 67,57% sedangkan di daerah non SDA telah mencapai 98,04% di tahun 2008, ini mengindikasikan bahwa angka struktur jaringan listrik di daerah non SDA, jauh lebih baik, penduduknya telah menikmati listrik hampir secara keseluruhan.

Dari faktor-faktor kuantitatif yang telah diuraikan, baik berupa konsumsi perkapita yang rendah, saving perkapita yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, dari indikator kesejahteraan yang rendah di daerah penghasil SDA, yang menjadi salah satu faktor penyebab utama dari keadaan ini adalah adanya derajat penghisapan ekonomi yang sangat tinggi yaitu mencapai rata-rata angka sebesar 63,9 % sedangkan daerah non SDA hanya sebesar 42 %

Diantara daerah SDA yang paling tinggi derajat penghisapannya adalah Kalimantan Timur yaitu sebesar 88,21% dan daerah non SDA yang paling tinggi adalah DKI Jaya yaitu sebesar 49,39%, ini berarti sadar atau tidak sadar Jakarta adalah daerah paling empuk untuk beroperasinya Trans Internasional Corporate baik disektor rill maupun sektor finansial yang sudah kita ketahui hampir 90 % telah dikuasai oleh asing.

Dari tabel-tabel yang telah dikemukakan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Perbandingan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah Penghasil SDA dan Bukan Penghasil SDA.Tahun 2000 – 2010.

Daerah	PDRB/Kapita (Ribu Rp)	Konsumsi/Kapita (Ribu Rp)	Rasio Tabungan Terhadap PDRB/Kapita	Persentase Pengangguran (%)	Penduduk Miskin (%)	AKB	AHH	IPM	RT denga n Air Bersih (%)	RT dengan Listrik	Derajat Penghisapan Ekonomi
SDA	27.176.975	6.469.229	0,6362	12,33	21,32	26,1	70,8	71,0	22,61	67,57	0,84
NSDA	10.567.116	7.784.556	0,9362	9,34	17,11	18,08	73,05	72,67	19,46	98,04	0,42

Sumber data : Rangkuman Tabel, diolah penulis 2012.

Berkenaan dengan hal ini, Prof. Mubyarto, dalam bukunya "***Ekonomi Terjajah***" yang diterbitkan oleh Pustep-UGM tahun 2005, menjelaskan bahwa : krisis moneter 1997 - 1998 yang mengakibatkan "hengkangnya" modal asing (yang ditaksir USD 10 Milyar per tahun sejak 1997) justru berdampak positif yaitu menurunnya derajat penghisapan terhadap ekonomi Indonesia, dimana ada 12 propinsi derajat penghisapannya turun ini berarti bahwa menurunnya peranan modal asing yang beroperasi di Indonesia berdampak positif pada ekonomi Indonesia, seperti Propinsi Bali, DIY, Sulut dan NTT, kini menjadi daerah-daerah yang perekonomiannya jauh lebih mandiri. Ketimpangan ekonominya relatif rendah dan produksinya sebagian besar dapat dinikmati masyarakat setempat.

Yang tetap memprihatinkan adalah Propinsi yang kaya akan sumber daya alam yaitu Kaltim dan Riau yang derajat penghisapannya masih tinggi, ini berarti ekonomi daerah tersebut semakin timpang (Mubyarto, 2005 : 24) pernyataan ini juga diperkuat oleh M. Ridho Eisy, 1990, yang menyatakan : "perkembangan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hakekat penjajahan yaitu penghisapan satu bangsa oleh bangsa lain tidak berhenti setelah masa kemerdekaan tiba, hakekat penjajahan itu tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk yang lebih halus, lebih sopan, tetapi lebih kuat daya hisapnya dan lebih sulit melawannya, bentuk yang paling umum dari penjajahan model baru ini

adalah penjajahan ekonomi, diantaranya melalui cengkeraman Multi National Corporate (MNC)". (M. Ridho Eisy, 1990, PB PWI, dalam Mubyarto, 2005).

Berkaitan dengan keadaan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari sistim Demokrasi Ekonomi Indonesia yang terjadi sekarang ini dimana kita telah mengetahui bahwa sistim ekonomi Indonesia sekarang ini yang masuk kedalam tahap liberalisasi yang sangat dominan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia, terutama dalam memberikan kebijakan kepada semua korporasi asing untuk menguasai seluruh kekayaan sumber daya alam dan ekonomi di Indonesia.

Data kuantitatif telah menunjukkan bahwa hampir 85,4% eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, telah dikuasai oleh korporasi asing, perbankan di Indonesia hampir 70% berasal dari saham asing, pasar bursa efek dan valuta asing hampir 75% juga dikuasai oleh perusahaan finansial asing (Amien Rais, 2008). Bahkan baru-baru ini world bank telah meluncurkan program WATSAL (Water Structural Adjustment Loan) yang intinya adalah agar sumber daya air di Indonesia harus dikelola oleh perusahaan asing (Budi Santoso, Majalah Reforms, rubrik Survei Vol II halaman 55, Juni 2008).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Adi Sasono, 2008), yang menjelaskan UU No. 25/2007 tentang penanaman modal asing (PMA) bahwa semua sektor ekonomi sudah dapat dimasuki oleh pemodal asing, bahkan sektor pertanian, termasuk budidaya padi-pun dapat dimasuki oleh *Multi National Corporate*.

Ketika Stiglitz berkunjung ke Indonesia pada bulan Agustus 2007, ia mengingatkan supaya Indonesia keluar dari kungkungan pemahaman yang keliru terhadap globalisasi. Selama ini kelemahan kita adalah "kebodohan" dan "kepengecutan" kita sendiri sehingga seluruh mantra globalisasi seperti difatwakan oleh IMF, Bank Dunia dan WTO kita telan semuanya tanpa daya dan nalar nalar kritis yang diperlukan (Amien, Rais 2008).

Stiglitz mengingatkan bahwa liberalisasi pasar modal seperti kita praktikkan bukanlah sebuah solusi. "Bukti-bukti memperlihatkan bahwa di banyak negara berkembang, liberalisasi modal, pasar keuangan tidak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi bahkan menciptakan ketidakstabilan. India dan China yang pertumbuhan ekonominya tinggi terhindar dari krisis Asia tahun 1997 tanpa melakukan liberalisasi" (Kompas, 13 Agustus 2007)

"Indonesia perlu agenda baru". Ini adalah usulan terpenting Stiglitz yang seyogyanya kita dengarkan dengan cermat dan obyektif. Di antara agenda baru itu adalah *land reform* dan investasi yang lebih berkaitan dengan pendidikan. Di samping itu ada semacam agenda mendesak, yakni melakukan negosiasi ulang terhadap seluruh kontrak karya pertambangan yang pada intinya merugikan Indonesia sendiri dan memberikan keuntungan eksekusif pada korporasi asing. Jika pemerintah berani menegosiasi ulang kontrak karya pertambangan yang merugikan rakyat, Indonesia akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing (Tempo, 26 Agustus

2007).

“Mereka (para perusahaan tambang asing) tahu bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang”. Kata-kata Stiglitz ini seharusnya menjadi *wake-up call*, menjadi penggugah kita supaya kita berhenti menjadi bangsa yang "bodoh" atau "pura-pura bodoh". Dengan kata lain kita harus mampu menghentikan perampokan atau penjarahan oleh berbagai korporasi asing yang berlindung di balik kontrak karya yang sesungguhnya tidak masuk akal itu (Amien Rais, 2008).

Bukan itu saja. Selama di Indonesia Stiglitz memperkenalkan kembali sebuah istilah yang kita anggap tabu dan haram kita sebutkan, karena begitu takutnya kita mendengar istilah itu, yaitu nasionalisasi. "Sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia dirrasionalisasi" (Seputar Indonesia, 15 Agustus 2007), demikian pernyataannya.

Di Malaysia, Brazil, Chili dan Norwegia misalnya, pertambangan yang digarap sendiri oleh pemerintah ternyata mendatangkan keuntungan lebih besar dibandingkan bila diberikan kepada korporasi asing. Negara-negara Amerika Latin telah dengan jelas menunjukkan bagaimana negosiasi ulang mampu mendatangkan keuntungan jauh lebih banyak dan ternyata tidak ada perjanjian atau kontrak karya yang tidak dapat dinegosiasi kembali. Venezuela dibawah Hugo Chavez dan Bolivia di bawah Evo Morales membuktikan hal itu.

Mengapa Indonesia takut untuk sekedar meminta negosiasi? Kalau nasionalisasi dianggap terlalu ekstrim, terlalu revolusioner, bukankah ada

jalan lain untuk mencapai keadilan demi perbaikan nasib Indonesia sendiri, yaitu lewat negosiasi ulang? Mengapa Indonesia tiba-tiba kehilangan keberanian dan sekaligus kemandiriannya sebagai bangsa besar, bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi (setelah China, India dan Amerika Serikat).

Paling tidak ada empat alasan mendasar bahwa sudah tiba waktunya kita segera menuntut negosiasi ulang atas seluruh kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia selama puluhan tahun terakhir ini. Pertama, doktrin *pacta sunt servanda* harus dipahami sekaligus dengan klausula *rebus sic stantibus*, sebagaimana diuraikan secara singkat di atas. Bila sebuah kontrak atau perjanjian ternyata dalam pelaksanaan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak merundingkan kembali kontrak atau perjanjian tersebut. Negara-negara berkembang yang cukup cerdas sudah melakukannya (Amien, Rais 2008).

Kedua, pasal 1 ayat 2 *The International Rights Covenant on Civil and Political Right* mengatakan :

“Semua bangsa, untuk mencapai tujuannya memiliki kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alamnya. Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa kerjasama ekonomi internasional harus didasarkan pada prinsip saling-untung dan pada hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa kehilangan atau dihilangkan hak hidupnya.

(All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural

wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic corporation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case a people be deprived of its means of subsistence).

Jadi tidak ada alasan sampai kita takut mengelola kekayaan alam kita sendiri, apalagi untuk kesejahteraan bangsa kita sendiri pula.

Ketiga, tafsir yang agak luas atas *Universal Declaration of Human Rights* (1948) memberikan kita keyakinan bahwa melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki untuk bangsa Indonesia sendiri adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Pasal 3 dan 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk menikmati hidup, kebebasan dan keamanan. Tidak diperkenankan ada seseorang yang dikungkung dalam perbudakan dan penghambaan. Seorang pakar mengatakan bahwa, "*each people's right to its resources is a human right*", hak setiap orang/ bangsa untuk menguasai kekayaan alamnya adalah hak asasi manusia.

Keempat, kita sudah merdeka lebih dari 6 dasawarsa. Sudah sangat terlambat kalau masih saja mengabaikan pesan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kontrak Karya Pertambangan (KKP) di dunia pertambangan non-migas maupun Kontrak *Production Sharing* (KPS) di dunia migas hampir tanpa kecuali merugikan Indonesia dan kelewat menguntungkan investor

asing. Karena kebanyakan *operatorship* pertambangan kita dipegang oleh pihak korporasi asing, maka *cost recovery* yang dibuat oleh investor asing selalu mengalami *mark-up* sampai tingkatan yang penuh dengan skandal manipulasi. Kurtubi, mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang menghisap kekayaan negara itu hakekatnya adalah warisan penjajahan.

Eddy Suandy Hamid (2009) dalam Makalah Seminar di Kongres ISEI XVII di Bukit Tinggi menjelaskan bahwa : Arti penting demokrasi ekonomi bagi Indonesia dewasa ini makin diperkuat dengan arus de-nasionalisasi ekonomi selama ini yang telah membentuk kembali susunan ekonomi Indonesia di bawah dominasi pemodal internasional. Pemodal internasional saat ini telah menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari 70% saham perbankan di Indonesia (FRI, 2007). Korporasi asing menduduki 10 besar produsen migas di Indonesia. Chevron Pacific (AS) berada di urutan pertama diikuti Conoco Phillips (AS), Total Indonesie (Prancis), China National Offshore Oil Corporation (Tiongkok), Petrochina (Tiongkok), Korea Development Company (Korea Selatan), dan Chevron Company (Petro Energy, 2007). Sementara itu, delapan di antara 10 besar produsen gas di tanah air pun dikuasai asing. Total E&P Indonesie menempati peringkat pertama dengan total produksi gas mencapai 2.513 juta kaki kubik per hari dan Pertamina di peringkat kedua dengan total produksi 948,9 mmscfd (Investor Daily, 2007).

Di sisi lain, perwujudan demokrasi ekonomi saat ini makin menjauh dari ideal dimana ketimpangan struktural ekonomi justru kian melebar. Pelaku ekonomi rakyat (UMKM) Indonesia yang pada tahun 2006 berjumlah 48,9 juta (99,9%) hanya menikmati 37,6% "kue produksi nasional", sedangkan minoritas pelaku usaha besar (0,1%) justru menikmati 46,7%-nya pada tahun yang sama. Hasil produksi yang dinikmati usaha besar (korporasi) ini naik 3,6% dibanding tahun 2003 yang sebesar 43,1%. Data perbankan menunjukkan bahwa per Juli 2007, 1.380 Trilyun dana pihak ketiga di bank 80%-nya dikuasai 1,82% pemegang rekening (Kuncoro, 2007). Rekening bernilai di atas 100 juta dengan total nilai 85% Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya terdiri dari sekitar 1,5% rekening. Bahkan yang bernilai di atas 1 milyar hanya terdiri dari 0,14% rekening, yang menguasai lebih dari 50% DPK (Rizki, 2007), dalam Eddy Suandy Hamid (2009).

Dalam konteks makro-daerah, sentralisasi fiskal tetap berlangsung di tengah pelaksanaan otonomi daerah dan masih besarnya derajat ketimpangan ekonomi antar daerah. Rasio PAD terhadap APBD di Kabupaten/Kota 5 tahun setelah Otonomi Daerah (2006) yang sebesar 6,80%, justru turun dari sebesar 10,31% pada tahun 1999/2000 (Kuncoro, 2008). Ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat terjadi bersamaan dengan sentralisasi ekonomi (perbankan, media, korporasi) di pusat bisnis dan kekuasaan (Baswir, 2007).

Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut diatas maka

mengakibatkan angka kemiskinan menjadi tinggi di Indonesia, walaupun ada penurunan dalam setiap tahun, yang ironisnya justru terdapat di daerah yang kaya akan sumber daya alam, dimana dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia, dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut ini.

**Tabel 1.5. Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia.
Tahun 2006-2010.**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Jiwa	Prosentase Penduduk Miskin
2006	39,30	17,76
2007	37,17	16,58
2008	34,96	15,42
2009	32,53	14,15
2010	31,02	13,33

Sumber Data : Data Susenas BPS Pusat Jakarta,2012

Dari pemaparan latar belakang tersebut terlihat bahwa ada permasalahan/problem yang dapat diidentifikasi yaitu bahwa kemiskinan di Indonesia, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) terjadi karena tidak adanya penerapan demokrasi ekonomi yang adil, baik dalam bentuk demokrasi produksi yang rendah, demokrasi pemilikan faktor produksi yang belum optimal, demokrasi alokasi dan konsumsi yang masih pincang dan derajat penghisapan ekonomi yang masif terutama di daerah penghasil sumber daya alam (SDA).

Oleh sebab itulah, penulis berusaha untuk meneliti dimensi Demokrasi Ekonomi Indonesia dalam keterkaitannya dengan kemiskinan

dan kesejahteraan, sehingga dipilih judul Disertasi : **“Pengaruh Demokrasi Ekonomi dan Derajat Penghisapan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dengan daerah bukan penghasil sumber daya alam (NSDA) di Indonesia.
2. Apakah ada pengaruh demokrasi produksi (DP), terhadap kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (NSDA) di Indonesia.
3. Apakah ada pengaruh demokrasi pemilikan faktor produksi (DPFP) terhadap kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (NSDA) di Indonesia.
4. Apakah ada pengaruh demokrasi alokasi dan konsumsi (DAK) terhadap kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (NSDA) di Indonesia.
5. Apakah ada pengaruh derajat penghisapan ekonomi (DPE) terhadap kemiskinan antara daerah penghasil sumber daya alam

(SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (NSDA) di Indonesia.

6. Apakah ada perbedaan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari demokrasi produksi (DP), terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja antara daerah SDA dan NSDA di Indonesia
7. Apakah ada perbedaan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari demokrasi pemilikan faktor produksi (DPFP), terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja antara daerah SDA dan NSDA di Indonesia.
8. Apakah ada perbedaan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari demokrasi alokasi dan konsumsi (DAK), terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja antara daerah SDA dan NSDA di Indonesia
- 9..Apakah ada perbedaan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari derajat penghisapan ekonomi (DPE), terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja antara daerah SDA dan NSDA di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (NSDA) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Demokrasi Produksi (DP), Demokrasi Produksi (DP), Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) terhadap tingkat kemiskinan di daerah SDA dan daerah NSDA di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung antara demokrasi produksi (DP), demokrasi pemilikan faktor produksi (DPFP), demokrasi alokasi dan konsumsi (DAK), derajat penghisapan ekonomi (DPE) terhadap kemiskinan di daerah penghasil SDA dan daerah bukan penghasil SDA di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, dunia usaha, Ilmuwan, dan peneliti lebih lanjut untuk membahas persoalan yang berhubungan dengan Index Demokrasi Ekonomi Indonesia, Derajat Penghisapan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
3. Sebagai koreksi dan evaluasi satu dasawarsa otonomi daerah, khususnya dalam persoalan yang berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A.1. Kemiskinan Dan Demokrasi Ekonomi

Bank Dunia (2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas adalah penyebab seseorang jatuh terjerembab ke dalam kemiskinan.

Sen dalam Ismawan (2003) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Menurut Kuncoro (2000), penyebab kemiskinan adalah:

Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, selain itu juga dijelaskan bahwa:

Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Terakhir kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Nurkse dalam Kuncoro, 2000). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima, Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan.

Kemiskinan, khususnya kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif. Penduduk, baik pendatang (urbanis) maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan

kerja, dengan kemampuan yang mereka miliki menciptakan kesempatan kerja dengan Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumberdaya terbatas dan kualitasnya rendah.

Di daerah perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam katagori miskin. Prilaku para migran dalam kehidupan kota yang sedemikian rupa, yakni pengeluaran yang serendah-rendahnya di daerah tujuan (kota) agar dapat menabung untuk dapat di bawa pulang ketika mereka mudik ke kampung halaman (daerah asal). Para migran memanfaatkan hanya sebagian kecil pendapatannya mereka untuk pengeluaran di daerah tujuan, disamping memang sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah karena kualitas sumberdaya manusianya juga rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah satu ciri kemiskinan perkotaan.

Di daerah perkotaan, terputusnya akses pengairan di sebagian subak-subak, berdampak pada perubahan prilaku petani. Apabila petani tidak dapat segera mengantisipasi perubahan tersebut, mereka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas produktif di pertanian. Optimalisasi lahan yang telah terputus akses pengairannya perlu segera dipolakan agar kemanfaatannya oleh petani dan masyarakat perkotaan dapat dirasakan.

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga menurut Swapna Mukhopadhyay kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah (Arsyad, 1999).

Selain itu, menurut Ferdericks kebijakan-kebijakan dalam negeri sering kali tidak terlepas dengan keadaan yang ada diluar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan (Arsyad, 1999).

Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidakikutsertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu mendayagunakan faktor produksinya, dan dapat pula terjadi secara tidak alamiah.

Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.

Oleh karena itu kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural.

Dan menurut Selo Sumarjan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Arsyad, 1999).

Dalam jurnalnya, Samsubar Saleh tahun 2002, terdapat juga faktor-faktor lain sebagai penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut :

Tingkat pendapatan per kapita per propinsi, Pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia per kapita per propinsi, (penjumlahan pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; sektor kesehatan,

kesejahteraan, peranan wanita, anak, dan remaja; sektor tenaga kerja; dan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi), pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik per kapita per propinsi, angka harapan hidup, angka melek huruf persentase dari total penduduk, rata-rata lama bersekolah penduduk (dalam tahun), indeks pengembangan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI), indeks partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik atau gender empowerment index atau lebih tepat diistilahkan *women empowerment index*, rasio Gini, rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap fasilitas kesehatan, rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap air bersih.

A.2. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Jepang solusi yang diterapkan adalah dengan menerapkan pajak langsung yang progresif atas tanah dan terbatas pada rumah tangga petani pada lapisan pendapatan yang tinggi. Sedangkan Cina melakukannya melalui pembentukan kerangka kelembagaan perdesaan dengan kerja sama kelompok dan brigades di tingkat daerah yang paling rendah (*communes*). Di sisi lain, solusi pemberantasan kemiskinan di Taiwan melalui mobilisasi sumber daya dari sektor pertanian dengan mengandalkan mekanisme pasar.

Selain strategi di atas, ada juga Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi atau *Rural Led Development* yang menyoroti potensi pesatnya

pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin. Di Indonesia salah satu strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui pemberdayaan partisipatif masyarakat. Sasaran dari program ini adalah kaum miskin perkotaan yang sangat rentan terhadap krisis dibandingkan dengan masyarakat perdesaan.

Menurut Bank Dunia (2006), ada tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah. Dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:

1. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan-baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.

2. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses pemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah.

3. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat

Miskin. Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah

dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia saat ini.

Bank Dunia dalam PPID MEP UGM (2008), merumuskan kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia melalui beberapa program, yaitu: peningkatan fasilitas jalan dan listrik pedesaan, perbaikan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik, membatasi pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin, pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin, membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin, perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah, mengurangi tingkat kematian ibu pada saat persalinan, menyediakan lebih banyak dana untuk daerah miskin, merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Ada tiga perubahan sedang berlangsung di Indonesia yang berpotensi membantu masyarakat miskin (Bank Dunia, 2006): Pertama, seiring dengan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sedang berubah dari perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian menjadi perekonomian yang akan lebih banyak mengandalkan sektor jasa dan industri. Prioritas untuk membuat pertumbuhan tersebut berfaedah bagi masyarakat miskin adalah iklim investasi yang lebih ramah di pedesaan, terutama melalui jaringan jalan pedesaan yang lebih baik., Kedua, seiring menguatnya demokrasi, pemerintah sedang berubah dari penyedia sebagian besar layanan oleh pusat menjadi pemerintah yang akan lebih banyak mengandalkan pemerintah daerah. Untuk membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin, prioritasnya adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan insentif yang lebih baik bagi penyedia layanan, Ketiga, seiring dengan integrasi Indonesia ke dalam dunia internasional, sistem perlindungan sosialnya sedang dimodernisir sehingga secara sosial Indonesia menjadi setara dan kompetitif di bidang ekonomi. Prioritas untuk membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat miskin adalah bergeser dari intervensi pasar untuk komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin (seperti BBM dan beras) menjadi bantuan pendapatan yang terarah bagi rumah tangga miskin, dan menggunakan kelonggaran fiskal untuk memperbaiki layanan yang penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi.

Kaitan Investasi dengan Pengentasan Kemiskinan dapat dilihat

misalnya dari kasus di Bangladesh. Fan, Hazell dan Thorat (2000) menyatakan bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan pedesaan di India, pemerintah dapat berperan dalam menentukan prioritas utama pada investasi jalan pedesaan dan riset pertanian. Pengeluaran untuk pendidikan juga penting untuk mengurangi kemiskinan. Investasi lainnya yaitu untuk irigasi, konservasi air dan tanah, kesehatan dan pengembangan komunitas pedesaan. Keseluruhan investasi tersebut pada akhirnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan produktivitas. Mallick (2008) menambahkan satu cara/mekanisme lain untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah meningkatkan peran sektor keuangan terutama mengkaitkan program kredit perbankan dengan lembaga keuangan mikro.

Laporan perekonomian Bangladesh yang dipublikasikan oleh International Monetary Fund (2005) menunjukkan bahwa investasi menjadi faktor yang utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kondisi perekonomian Bangladesh yang cenderung tidak mendukung peningkatan investasi seperti ketersediaan listrik dan gas yang terbatas, jaringan transportasi yang minim, jasa telekomunikasi kurang bagus, fasilitas bandara kurang bagus, korupsi dan penegakan hukum lemah. Pemecahan masalah-masalah tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Langkah yang diambil oleh pemerintah Bangladesh adalah mengikuti konsep yang ada dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) secara bertahap.

Dari sisi pengembangan industri, Pemerintah Bangladesh memfokuskan pada peningkatan investasi di industri padat karya dan industri pedesaan. Pemerintah yang berperan disisi fiskal sangat penting untuk menstimulus investasi dan memberi insentif industri terutama investasi untuk pembangunan infrastruktur. Di era persaingan global ketersediaan teknologi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan daya saing ekonomi dan keahlian masyarakat. Investasi dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan terutama di negara-negara berkembang. Investasi TIK dan infrastruktur lainnya tidak hanya mengandalkan ketersediaan dana di dalam negeri tetapi juga perlu mendorong investasi asing. Keuntungan dari investasi asing adalah mempercepat ketersediaan pendanaan pembangunan, alih teknologi, penciptaan peluang kerja, transformasi sosial dan keahlian manajerial.

Dari sudut pandang makroekonomi, penciptaan stabilitas perekonomian merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan terutama iklim investasi. Ketidakstabilan makroekonomi dapat meningkatkan risiko bisnis, menghambat investasi dan kegagalan dalam pengurangan kemiskinan serta pengangguran.

Beberapa teori yang melandasi pemikiran dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan ini adalah sebagai berikut :

1. Model Teori Nurkse

Pada awal pembangunan di Indonesia, beredar suatu teori yang dimunculkan ekonom Swedia Ragnar Nurkse. Teori ini disebut “Lingkaran Setan Kemiskinan” (*Vicious Circle of Poverty*). Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang. Inti teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama untuk membentuk modal masyarakat.

Untuk memutus lingkaran ini maka titik potongnya adalah pada peningkatan produktivitas. Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi. Namun demikian, negara berkembang kesulitan dalam mengalokasikan modal.

Nurkse juga melihat bahwa penyebab kemiskinan adalah dari 2 sudut yaitu dari sisi *supply* yaitu yang menyiapkan tabungan dan dari sudut demand yaitu yang melakukan investasi. Ini dapat dilihat lingkaran yang tak berujung pangkal. Dari sisi *supply*, kurangnya tabungan adalah karena pendapatan rendah, tabungan yang rendah, investasi rendah menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas rendah menyebabkan

pendapatan rendah. Di sisi *demand* investasi yang rendah berarti modal rendah yang menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah pendapatan rendah dan kembali kepada investasi rendah.

Kebanyakan tabungan di negara terbelakang dilakukan kelompok pendapatan tinggi, tetapi tabungan itu tidak ke saluran produktif, mereka dimanfaatkan untuk rumah mewah, emas, permata, menimbun barang dagangan untuk tujuan spekulasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi gairah menabung adalah faktor ketidakstabilan di bidang hukum, ketertiban, praktik moneter yang tidak stabil, meluasnya sistem KKN yang menguras sumber-sumber dan tidak jelasnya tata ruang suatu wilayah.

Penyebab lain dari kurangnya gairah investasi adalah kebiasaan yaitu hanya terfokus kepada yang sudah dikenal seperti di Kalimantan Timur ini terfokus pada investasi sumber daya alam tetapi tidak mendiversifikasi produksi lanjutan atau hanya terindustri satu sama lain. Faktor kedua pasar domestik yang terbatas karena daya beli. Ketiga, kesulitan mendapat dana dan keempat kurangnya buruh terampil, kelima adalah kurangnya prasarana, transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas faktor budaya yang tidak kalah pentingnya dan mendorong peningkatan dan pergerakan investasi. Menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan politik, kekayaan manusia, sikap social, dan latar belakang sejarah (Jhingan, 1990, hal 47).

Ahli ekonomi seperti Myint, Prebisch, Singer, Lewis, dan Myrdall telah mengembangkan teori tentang penghisapan suatu negara terbelakang secara internasional, mereka berpendapat bahwa di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan yang tidak seimbang, akibatnya keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju. *Term of Trade* tidak seimbang, dan harga-harga produk dari negara dunia ketiga pelaku tidak stabil di pasaran internasional karena komoditi yang diekspor adalah berasal dari sektor primer.

Muncul pertanyaan bagaimana jalan keluar dari lingkaran tak berujung pangkal. Teori R. Nurkse adalah *Balance Growth*, artinya untuk keluar dari lingkaran harus dilakukan pembangunan yang seimbang artinya semua sektor harus dibangun, yaitu sektor industri komplementer sehingga diharapkan terjadi pasar yang sempurna. Kalau pembangunan yang bersifat komplementer akan menaikkan efisiensi yaitu adanya *external economic* yang berupa *pecuniary external economic*.

Cara melakukan hal ini adalah pendirian rentetan industri keseimbangan antara sektor industri dan pertanian, keseimbangan antara investasi dan swasta, serta antara swasta dan investasi social overhead capital.

Selain keseimbangan yang dimaksud tersebut juga perlu ditempuh keseimbangan antar-sektor domestik dan sektor internasional. Hal ini disebabkan pembangunan domestik memerlukan sumber-sumber devisa.

Teori ini dibantah oleh Hirschman, Singer, dan Kurihara. Karena teori ini tidak melihat bahwa mekanisme pasar tidak bisa berjalan

disebabkan negara yang kurang maju justru tipe pasarnya tidak sempurna. Teori ini tidak bisa berjalan karena di negara yang kurang maju justru kekurangan modal. Selain itu di negara tersebut banyak mengandung resiko. Karena alasan itulah, Hirschman mengajukan satu teori yang disebut "*Unbalanced Growth*".

2. Teori Hirschman

Hirschman mengemukakan teori yang disebut pembangunan tidak seimbang (*Unbalanced Growth*). Ia mengajukan suatu pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan harus ada pilihan-pilihan sebagai suatu strategi, mengingat di negara yang belum maju memiliki kekurangan terhadap modal. Strategi yang dimaksud adalah memilih sektor-sektor yang memberikan backward linkage (keterkaitan ke belakang) dan *forward linkage* (keterkaitan ke depan) yang besar. Untuk mengetahuinya beberapa ahli menggunakan perangkat Analisis Input-Output. Sektor ini tidak akan berjalan mulus apabila tidak diimbangi pembangunan yang disebut *Social Overhead Capital (SOC)*.

Pembangunan SOC adalah pembangunan yang bersifat penunjang seperti infrastruktur seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, air minum, pembangunan di bidang energi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di bidang sosial lainnya. Alasan Hirschman memilih sektor yang *backward* dan *forward linkage* yang besar karena dengan sektor ini akan

memberikan *external economic* yang akan meningkatkan tingkat efisiensi sektor-sektor yang ada kaitannya. Ini berarti dampaknya dapat meningkatkan daya saing.

Tetapi Hirschman tidak melihat bahwa berkembangnya sektor ini akan menumpuk di suatu tempat sehingga menimbulkan dampak negatif terutama urbanisasi dan dampak lingkungan yang tidak terkendali. Dampak negatif ini baik yang bentuknya fisik maupun sosial ekonomi, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Hirschman tidak terlalu mengantisipasi daerah-daerah di belakangnya tidak terlalu maju, mengingat daerah tersebut tidak terlalu siap untuk mengantisipasi kemajuan tersebut terutama menyiapkan sumber daya manusia.

Pembangunan tidak seimbang banyak dilakukan di berbagai negara seperti di Amerika Latin dan Indonesia. Terutama pada masa orde baru di mana menitikberatkan pada pertanian dan industri yang menunjang pertanian. Dalam perjalanannya proses ini tidak berlalu dengan mulus, karena terjadi pergeseran ke industri yang substitusi impor yang tidak berjalan normal, karena selalu terpengaruh oleh kegoncangan internasional.

3. Teori Myrdall

Myrdall mengatakan bahwa permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi

sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah (lihat tabel 1). Banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai pertumbuhan ($\pm > 7\%$ /tahun), tetapi tingkat kesenjangan pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan kesenjangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Gunar Myrdal proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di tiap negara menghasilkan hubungan sirkuler yang menyebabkan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. *Backwash effect* (dampak balik) cenderung lebih besar daripada *spread effect* (dampak sebar). Peranan bebas kekuatan pasar dan perdagangan bebas menghambat potensi ekspor negara terbelakang, sehingga memperparah *export gap*. Kesenjangan internasional dan menyebabkan kesenjangan regional, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi NSB yang berdampak semakin kecilnya pendapatan perkapita.

4. Teori Kuznets

Simon Kuznets (1955) menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada perkembangan teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi. Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara

maju, yaitu: (1) Pertumbuhan output per kapita yang tinggi; (2) Kenaikan tingkat produktivitas faktor produksi yang tinggi; (3) Transformasi struktur ekonomi yang cepat; (4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (5) Terdapat kecenderungan negara maju untuk memperluas pasar dan sumber bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi internasional); (6) Penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia.

Teori-teori pembangunan yang berkembang tidak menyinggung masalah kemiskinan secara eksplisit sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus dalam penyelesaiannya. Teori pembangunan yakin masalah kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan merupakan syarat keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pada awal pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi sampai pada tingkatan tertentu baru menurun.

Beberapa pendapat yang membantah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti dengan tingkat kesenjangan yang tinggi yaitu: Tingkat kesenjangan yang tinggi pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Masyarakat miskin tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga kualitas sumber daya yang dihasilkan rendah, yang menyebabkan produktivitas rendah. Dalam jangka panjang justru akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, selain itu kelompok masyarakat

yang kaya tidak selalu menginvestasikan pendapatannya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru cenderung bersifat konsumtif dengan membeli barang-barang mewah yang diimpor atau belanja ke luar negeri sehingga menimbulkan kebocoran ekonomi yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian, pendapatan yang rendah menimbulkan standar hidup yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, nutrisi yang rendah yang menyebabkan produktivitas rendah, yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga dijelaskan bahwa kesenjangan yang tinggi menimbulkan efek psikologis yang berdampak buruk pada kondisi sosial politik. Kesenjangan yang tinggi menimbulkan potensi konflik sosial menciptakan iklim yang tidak baik untuk investasi dan berusaha dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, meningkatnya pendapatan kelompok miskin akan menstimulus permintaan yang mendorong ekspansi ekonomi.

5. Teori Pembangunan Lewis

Asumsi yang digunakan oleh Lewis (1954), adalah : (1) Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional yang bersifat subsisten dan sektor urban yang berdasarkan pada industri manufaktur; (2) Sektor tradisional (subsisten) dicirikan oleh terjadinya surplus tenaga kerja dan produk marginal tenaga kerja sama dengan nol, sehingga tenaga kerja dapat berpindah ke sektor

lain tanpa mengurangi output sektor pertanian dan suplai tenaga kerja industri bersifat elastis sempurna artinya berapapun peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja dapat dipenuhi tanpa menyebabkan tekanan pada tingkat upah pada sektor industri; input kapital dan teknologi bersifat tetap; (3) Tingkat upah pada sektor industri lebih tinggi dari sektor tradisional, dan keuntungan yang diperoleh pada kegiatan industri digunakan untuk melakukan investasi sehingga input kapital dapat meningkat.

Proses transformasi terjadi karena surplus tenaga kerja di sektor tradisional pindah ke sektor industri yang lebih menarik karena tingkat upah lebih tinggi. Urbanisasi ini menggerakkan sektor industri dan keuntungan yang diperoleh seluruhnya diperuntukkan investasi sehingga kapital meningkat. Peningkatan kapital menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang dapat dipenuhi oleh sektor tradisional, sehingga terjadi perpindahan dari sektor tradisional ke sektor modern. Peningkatan tenaga kerja akan meningkatkan output dan keuntungan sektor industri sehingga dapat menghasilkan akumulasi kapital dan meningkatkan investasi, kapasitas produksi dan permintaan terhadap tenaga kerja.

6. Teori Ranis Fei

Teori Ranis-Fei (1968) berkenaan dengan suatu negara

terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumber daya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional.

Bidang-bidang non-pertanian memang ada, tetapi tidak begitu banyak mempergunakan modal. Di situ juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

7. Teori Schumpeter

Schumpeter, dalam mudrajad kuncoro (1997), menekankan pentingnya entrepreneurship dengan inovasi sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Adapun jenis-jenis dari inovasi antara lain : (1) diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada (2) diperkenalkannya cara berproduksi baru, (3) pembukaan daerah-daerah pasar baru, (4) penemuan sumber-sumber bahan mentah baru, dan (5) perubahan organisasi industri yang dapat meningkatkan efisiensi industri.

Dampak dari adanya inovasi meliputi : (1) diperkenalkannya teknologi baru, (2) inovasi menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi

kapital, dan (3) inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha yang meniru teknologi baru.

8. Konsep Sayogjo dan Mubyarto

Menurut Sayogjo (1985) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan tingkat kehidupan yang berada di bawah standar minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan (kalori dan protein) yang membuat seseorang cukup mampu bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi. Kebutuhan pokok pangan ini dinyatakan berdasarkan pengeluaran dalam bentuk ekuivalen tukar beras (Kg/Orang/Bulan).

Sayogjo juga telah mencoba membuat klasifikasi kemiskinan sebagai berikut: a. Miskin yaitu pengeluaran rumah tangga berada di bawah 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; b. Miskin sekali yaitu pangan tak cukup di bawah 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Sayogjo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Kelemahan dari metode ini adalah hanya menggunakan acuan satu harga komoditi dan porsinya dalam anggaran keluarga, bahkan dalam keluarga miskin, menurun secara cepat.

Mubyarto (2005) mengemukakan konsep derajat penghisapan yang menimpa daerah-daerah di Indonesia. Menurutnya banyak daerah, terutama yang kaya sumber daya alam, di masa Orde Baru (1966-1998)

merasa “dihisap” kekayaannya oleh pemerintah pusat, atau oleh investor asing. Nilai dan tingkat “penghisapan” ini dapat ditaksir. Salah satu cara menghitung atau menaksirnya adalah dengan membandingkan nilai PDRB (per kapita) dengan nilai pengeluaran konsumsi per kapita. Dengan asumsi tabungan (*saving*) masyarakat tidak cukup berarti.

Jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran konsumsi penduduknya, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Dengan perkataan lain sebagian PDRB memang “dikirimkan” kembali kepada pemiliknya atau investor dari luar daerah.

B. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Tulus Tambunan (2006) dalam bukunya yang berjudul “Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis”, menjelaskan bahwa : Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak NSB, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar karena jika dua masalah ini berlarut-larut atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsukwensi politik dan social yang sangat serius. Suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya. Bahkan kejadian tragedi Mei 1998

menjadi suatu pertanyaan (hipotesis) hingga sekarang: andaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia sama seperti misalnya di Swiss, mungkinkah mahasiswa akan begitu ngotot berdemonstrasi hingga akhirnya membuat rejim Soeharto jatuh pada bulan Mei 1998?

Di Indonesia, pada awal pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan *trickle down effects*? Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintahan / administrasi negara, kantor-kantor perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya lebih tersedia di Jawa (khususnya Jakarta dan sekitarnya) dibandingkan di propinsi-propinsi lain di Indonesia. Pembangunan pada saat itu juga hanya terpusatkan di sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk

menghasilkan NTB yang tinggi. Mereka percaya bahwa nantinya hasil daripada pembangunan itu akan "menetes" ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun sejak Pelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut kecil (kalau tidak bisa dikatakan sama sekali tidak ada), atau proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat: pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian PN juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak; bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi.

Sebenarnya, menjelang akhir tahun 1970-an, pemerintah sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, sejak Pelita III strategi pembangunan mulai dirubah: tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama daripada pembangunan. Sejak itu perhatian mulai diberikan pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan perdesaan, dan modernisasi sektor pertanian. Hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi, sudah banyak dilaksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk

mengurangi (kalau tidak bisa menghilangkan sepenuhnya) jumlah orang miskin dan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air. Program-program tersebut antara lain adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga (khususnya di pedesaan), transmigrasi, pelatihan / pendidikan dan masih banyak lagi. Sayangnya, krisis ekonomi tiba-tiba muncul yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan kedua tahun 1997, dan sebagai salah satu akibat langsungnya, jumlah orang miskin dan *gap* dalam distribusi pendapatan di tanah air membesar; bahkan menjadi jauh lebih buruk dibandingkan dengan kondisinya sebelum krisis.

C. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah dibahas di atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu, seperti telah dikatakan sebelumnya, banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah / negara seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

D. Implementasi Demokrasi Ekonomi Indonesia

Iwan Jaya Azis, dalam jurnal tulisannya yang berjudul "Demokrasi Ekonomi, Masalah Sistem Kekuasaan atau Tradisi Kebudayaan Kekuasaan" (1993) menjelaskan bahwa :

Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya.¹ Karena itu, sampai sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan secara obyektif dalam praktek dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal tersebut terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Apakah praktek dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya atau belum? Apakah sudah mantap atau belum? Kedua pertanyaan tadi menjadi alat ukur yang harus selalu dijawab. Perkembangan inilah yang harus dipantau dan dievaluasi secara terus menerus, kemudian dikoreksi

dan disempurnakan.

Dari hasil pengamatan empiris, dapat diungkapkan bahwa secara umum pembangunan ekonomi telah dapat dirasakan hasilnya. Walaupun, diakui masih terdapat beberapa kekurangan antara lain kesenjangan ekonomi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok pendapatan. Konstitusi maupun GBHN sebenarnya telah memberikan arahan yang cukup jelas ke mana tatanan perkembangan ekonomi kita seyogyanya akan dibawa. Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan sejak semula merupakan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran yang demikian menghendaki adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana faktor produksi dimanfaatkan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi, yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat. Lebih-lebih kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan ketersediaan factor produksi.

Secara tradisional hasil produksi merupakan fungsi dari tiga faktor, yaitu: [1] ketersediaan tenaga kerja, [2] ketersediaan modal, dan [3] ketersediaan teknologi. Untuk faktor yang pertama kita memiliki ketersediaan yang sangat terbatas. Kegiatan produksi pada akhirnya haruslah dapat mencapai kombinasi yang optimum dari ketersediaan ketiga faktor produksi tersebut. Sehingga dapat mencapai tingkat produksi yang paling maksimal.

Di sisi lain, pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh sifat permintaan. Permintaan yang semakin meningkat terhadap barang dan jasa secara otomatis akan semakin meningkatkan pemenuhan terhadap

barang-barang produksi tersebut. Meningkatnya permintaan dapat dijadikan indikasi adanya peningkatan kemampuan atau daya beli masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan mereka. Meningkatnya tingkat pendapatan merupakan syarat utama adanya kemakmuran yang makin membaik dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya permintaan terhadap barang produksi menuntut adanya peningkatan kapasitas produksi, yang dapat dipenuhi dengan memperluas kegiatan produksi dengan membuka lapangan kerja baru. Semakin meluasnya lapangan kerja baru akan semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah penduduk yang berpendapatan tetap [membaik].

Secara teoritis, meningkatnya jumlah penduduk yang berpendapatan membaik merupakan pangsa pasar yang potensial bagi barang-barang produksi maupun bagi peningkatan modal untuk memperbesar skala produksi itu sendiri. Perkembangan pemikiran terakhir menyatakan bahwa negara yang ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi haruslah secara konsisten berorientasi pada perdagangan internasional.

Pemikiran itu tentu saja valid. Namun demikian sangat sering kita saksikan industri yang sejak awal berorientasi pada pasar internasional ternyata dipaksa untuk mawasdiri sebelum sempat berlomba. Penyebabnya karena tidak memiliki pengalaman yang cukup, yang tidak

memungkinkan bagi mereka untuk membangun efisiensi yang diperlukan dalam kompetisi ekonomi dunia yang semakin hari semakin bersaing dengan ketat. Menengok pengalaman negara lain, kita menemukan fakta bahwa negara-negara yang memiliki dukungan pasar domestik yang kuat seperti Cina misalnya, ternyata mampu menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal yang kini mampu mencapai taraf internasional. Pengalaman yang mendalam di pasar domestik yang kuat menjadi modal dasar bagi mereka untuk bersaing di pasar internasional.

Dalam berbagai hal, misalnya dengan dukungan pasar domestik yang cukup kuat, sebenarnya Indonesia juga berpeluang seperti itu. Kenyataan demikian mengharuskan kita untuk berpikir ulang. Bahwa betapapun dalam memasuki pasar global yang sangat kompetitif, kita harus berangkat dari keunggulan-keunggulan domestik sebagai dasar pijak kita untuk membangun daya saing. Keunggulan domestik itu tidak lain adalah ketersediaan factor produksi dan pasar yang kita miliki secara relatif berlimpah. Secara konseptual demokrasi ekonomi tidak bertentangan bahkan selaras dengan konsepsi membangun daya saing. Oleh karena itu membangun demokrasi ekonomi haruslah berlandaskan keunggulan-keunggulan yang dimiliki secara domestik. Sementara secara operasional dimensi demokrasi ekonomi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbagai mekanisme pemanfaatan sumber daya [faktor produksi]. Bagaimana alokasinya? Bagaimana modus partisipasi rakyat? Bagaimana dengan konsep pasar?

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. Selanjutnya GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi, harus dihindari adanya neoliberalisme dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku ekonomi. Oleh karenanya secara tegas, UUD 1945 dan GBHN menggariskan tentang perlunya pemihakan kepada upaya memberdayakan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat banyak. Bertitik tolak dari arahan UUD 1945 dan GBHN tersebut, pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta pengusaha kecil yang unggul sebagai pelaku ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional.

Tujuan yang ideal ini sulit diwujudkan jika tidak diikuti dengan kebijakan alokasi sumber daya nasional yang adil. Bertolak dari pengalaman negara-negara lain manakala penguasaan factor produksi lebih terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok, maka dalam kebanyakan kasus proses pemerataan kemakmuran berlangsung agak lambat atau bahkan terhambat. Karena itu sesungguhnya pemerataan kemakmuran lebih ditentukan oleh sifat penguasaan faktor produksi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dalam mengalokasikan faktor produksi tersebut ?

Sejak semula kita telah mengakui bahwa mekanisme pasar merupakan suatu cara untuk mencapai maksud tersebut. Kita mempercayai bahwa pada suatu tingkat kewajaran tertentu hukum penawaran dan hukum permintaan merupakan cara yang efisien untuk mendorong proses alokasi sumber daya yang efektif. Pasar yang dapat bersaing secara sempurna akan mampu mendistribusikan faktor produksi secara adil dan selanjutnya hasil-hasilnya dapat memberikan kemakmuran yang tinggi dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan orang-seorang atau kelompok. Namun demikian dalam prakteknya kita juga menyadari adanya berbagai ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Untuk mewujudkan pasar yang sempurna diperlukan beberapa

persyaratan diantaranya: adanya sejumlah pembeli dan penjual yang seimbang sehingga tidak ada pelaku ekonomi di pasar yang dapat mempengaruhi harga; adanya kebebasan masuk dan keluar atau ke dan dari pasar; barang dan jasa yang diperdagangkan relatif homogen; informasi dapat diterima secara sempurna oleh semua pelaku ekonomi di pasar; dan adanya kelancaran mobolitas sumberdaya manusia.

Dalam kenyataannya berbagai persyaratan ini sulit dipenuhi, sehingga pasar yang ideal tersebut tidak terwujud. Sebaliknya, di sana sini terjadi distorsi. Akibatnya bukan pemerataan yang kita dapatkan melainkan pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi dalam banyak kasus membawa dampak negatif. Ada kecenderungan mengarah pada praktek-praktek ekonomi anti kompetisi, misalnya penetapan harga lebih tinggi dengan penawaran barang dan jasa lebih sedikit, timbulnya praktek-praktek bisnis yang eksklusif, praktek-praktek diskriminasi harga, maupun praktek-praktek anti kompetisi lainnya. Kondisi semacam ini, sebagaimana juga pengalaman negara lain, akhirnya mengundang keterlibatan negara. Jika suatu faktor produksi sangat terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil, yang karenanya mengakibatkan kesenjangan di sisi pemerataan, maka negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mekanisme alokasi yang lebih benar. Pada cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan secara langsung negara dapat bersifat monopoli. Namun monopoli demikian merupakan bentuk monopoli yang diatur, misalnya patokan harganya harus cukup rendah

agar terjangkau rakyat banyak, dan jumlah barangnya cukup besar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada sebagian besar masyarakat.

Jelaslah bahwa di dalam demokrasi ekonomi, tujuannya adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan, di mana rakyat mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Dalam demokrasi ekonomi, penguasaan faktor produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme alokasi faktor produksi itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan pasar yang dikelola oleh negara.

Antara demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Salah satu pra-syarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil - adilnya bagi seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok tertentu.

Para pendiri republik ini telah meletakkan dasar-dasar yang jelas. Dilihat dari faktor sejarah, bahwa para pendiri negara ini merumuskan

dasar-dasar negara dilatarbelakangi oleh situasi adanya kesenjangan yang dalam antara lapisan atas yang lebih beruntung dengan sejumlah besar lapisan bawah yang kurang beruntung pada waktu itu. Tugas kita adalah menafsirkan kembali dan menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk aksiaksi kekinian sesuai masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam hal ini tentu kita tidak dapat menghindar diri dari tugas untuk memusatkan perhatian kita pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang beruntung itu. Hal ini membawa konsekuensi. Baik strategi maupun program pembangunan, harus memusatkan dana dan daya pada perbaikan nasib rakyat yang berada dalam keadaan materiil maupun spirituil agak terbelakang.

Namun harus dicatat bahwa pemusatan dana dan daya demikian tidak dimaksudkan untuk mematikan pengusaha besar, karena keberadaan usaha besar sebenarnya dapat berperanserta dalam proses perbaikan nasib rakyat yang menjadi pelaku usaha kecil dan koperasi. Misalnya dengan membuka peluang keikutsertaan usaha kecil dan koperasi ke dalam lingkaran kegiatan produksinya melalui kerjasama kemitraan dan sebagainya, sehingga usaha kecil dan koperasi dapat menyalurkan produksinya dan meningkatkan pendapatannya. Ini adalah salah satu bentuk pemberian peluang kepada wadah ekonomi rakyat untuk ikut serta aktif dalam proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya.

Dengan demikian pemusatan dana dan daya dimaksud lebih diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan usaha kecil dan koperasi

sebagai wadah ekonomi rakyat dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Pada umumnya kelemahan usaha kecil terletak pada lemahnya modal, pengalaman pasar yang minim dan dukungan sumber daya manusia yang lemah. Penghapusan kelemahan-kelemahan inilah yang harus menjadi arah pemusatan dana dan daya dimaksud. Dengan kuatnya modal, membaiknya pengalaman pasar dan berkwalitasnya sumber daya manusia pelaku usaha kecil dan koperasi yang menjadi wadah ekonomi rakyat, penguasaan faktor-faktor produksi diharapkan dapat lebih terdistribusikan secara adil dan merata. Dan selanjutnya mekanisme persaingan bebas pasar antara pelaku ekonomi dapat lebih berlangsung secara seimbang dan tidak monopolistik. Sehingga ketersediaan barang produksi di pasaran dan tingkat harga dapat lebih terjangkau sesuai daya beli masyarakat luas.

Kondisi demikian adalah syarat mutlak terlaksananya demokrasi ekonomi yang bertujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui kegiatan ekonomi yang melibatkan partisipasi rakyat banyak, baik dalam prosesnya maupun menikmati hasil-hasilnya.

D.1. Peran Pemerintah dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat

Demokrasi ekonomi, secara konseptual merupakan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagaimana konsep demokrasi dalam bidang politik. Demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai tujuan dan pelaku

utama dari kegiatan ekonomi. Kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuannya, bukan kemakmuran sekelompok atau orang [elit] tertentu. Dengan tujuan demikian, maka suatu keharusan adanya keterlibatan penuh rakyat di dalam segala bentuk, tahapan dan jenis kegiatannya. Dengan kata lain, dalam tata demokrasi ekonomi rakyat harus menempati posisi strategis dalam proses produksi.

Konsep demokrasi ekonomi dengan demikian menuntut adanya penghapusan praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan tujuan kemakmuran rakyat. Menghapus praktek ekonomi yang kurang memberi ruang keterlibatan rakyat di dalam kegiatannya, yang kurang menempatkan rakyat dalam posisi strategis dalam proses produksinya, atau yang hanya menjadikan rakyat sebagai obyek bukan subyek ekonomi.

Dengan pemahaman di atas, terdapat paling tidak dua prasyarat pokok yang sangat penting bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, adanya tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak, bukan orang seorang atau sekelompok. Kedua, adanya keterlibatan aktif rakyat dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam hal menikmati hasil-hasilnya. Dua syarat pokok ini dapat dikatakan menjadi ukuran dasar untuk menilai apakah sistem atau kegiatan ekonomi suatu masyarakat berlangsung demokratis atau tidak, dan sampai di mana kualitas demokrasi berjalan dalam tata kegiatan ekonominya.

Dalam kaitan ini harus dikatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai suatu konsep merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan konsep ekonomi kerakyatan di mana kemakmuran dan keterlibatan penuh rakyat di dalamnya merupakan esensi yang substansial. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ekonomi rakyat itu sendiri merupakan satu bentuk prakatek pelaksanaan paling riil daripada konsep besar demokrasi ekonomi. Dengan kata lain demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Ekonomi rakyat, dalam pelaksanaannya sehari-hari mensyaratkan keterlibatan rakyat secara masif dalam kegiatannya. Secara institusional, ekonomi rakyat terimplementasikan dalam wujud koperasi dan usaha kecil. Hal ini adalah karena koperasi dan usaha kecil merupakan wadah kegiatan ekonomi yang secara natural melibatkan sebagian besar rakyat yang menjadi tujuan pencapaian kemakmuran dari arahan GBHN dan cita-cita nasional.

Adanya syarat keterlibatan rakyat banyak ini adalah menyangkut bagaimana mekanisme alokasi sumber daya ekonomi produktif yang sesuai dengan tujuan dan syarat di atas. Sumber daya tersebut seperti modal, teknologi, informasi, pasar, manajemen dan sumber daya manusia yang bermutu. Untuk mendukung syarat di atas, maka mekanisme alokasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pasar yang efisien sekaligus dikelola oleh negara. Persoalannya kemudian adalah

bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam perekonomian nasional kita?

Paling sedikit ada dua masalah pokok yaitu: Pertama, masalah ketersediaan kesempatan atau peluang ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat. Kedua, masalah aksesibilitas terhadap peluang ekonomi yang tersedia tersebut.

Dalam hubungan ini, patut disebutkan bahwa pada umumnya peluang ekonomi buat rakyat banyak kurang tersedia karena pasar sering gagal dalam mengalokasikan faktor produksi secara lebih adil. Sebaliknya, pasar sering berpihak kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan akses-akses kekuasaan ekonomi. Akibatnya, faktor-faktor produksi strategis lambat laun mengalami sentralisasi [pemusatan] pada kelompok pelaku ekonomi tertentu melalui monopoli dan oligopoli. Pemusatan ekonomi di tangan kelompok kecil anggota masyarakat ini jelas menghambat penumbuhan peluang ekonomi kepada rakyat banyak.

Belajar dari pengalaman negara lain, tanpa keterlibatan pemerintah dalam menata kembali alokasi faktor-faktor produksi, akan sulit bagi rakyat untuk memperoleh peluang yang cukup untuk membangun aksesibilitas terhadap faktor-faktor produksi yang strategis. Hal ini karena logika pasar cenderung menciptakan penguasaan permanen terhadap faktor-faktor produksi yang dapat mempertahankan penguasaan pasar. Oleh sebab itu, peranan pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat banyak sangat strategis. Tetapi, peranan

tersebut harus ditangani secara penuh kehati-hatian agar tidak terjadi distorsi dalam alokasi faktor produksi dan menurunnya partisipasi masyarakat banyak.

Peranan pemerintah adalah sebagai stabilisator, dinamisator, akselerator dan regulator. Visi utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan untuk mendorong partisipasi rakyat banyak dalam pembangunan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk berupaya memperbesar kesempatan dan peluang usaha bagi rakyat banyak. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk netral. Artinya siapa saja diperkenankan menangkap peluang tersebut. Dengan demikian, regulasi yang sifatnya netral [tidak berpihak] sangat dibutuhkan dalam demokrasi ekonomi terutama untuk memacu efisiensi dan produktifitas.

Tetapi, karena kepemilikan faktor produksi dan informasi yang tidak merata, sering sekali peluang-peluang tersebut hanya ditangkap oleh sekelompok kecil rakyat yang lebih efisien dan lebih mampu. Itulah sebabnya, tidak cukup bagi pemerintah untuk menjadi sekedar netral. Sebaliknya, pemerintah dituntut untuk lebih menumbuhkan dan meningkatkan aksesibilitas rakyat banyak terhadap peluang ekonomi yang tersedia tersebut. Hal ini dilakukan melalui dua bentuk bantuan penguatan. Pertama, peningkatan mutu SDM rakyat yang tertinggal. Kedua, peningkatan aksesibilitas mereka terhadap pasar, permodalan, teknologi serta organisasi dan manajemen modern. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar lebih berpihak kepada rakyat banyak yang masih

tertinggal.

Kata “berpihak” di sini hendaknya diartikan sebagai “empowering” atau upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang masih tertinggal. Bukan diskriminasi dan bukan pula proteksi distortif. Dalam keberpihakan tersebut pemerintah berupaya untuk mempercepat peningkata taraf hidup [berarti daya beli relatif] dan sekaligus untuk mempercepat penumbuhan wawasan, kepercayaan diri, dan produktifitas rakyat yang umumnya menjadi pelaku ekonomi kecil.

Keseluruhan upaya tersebut dimaksudkan tidak lain untuk menumbuhkan basis atau daya saing ekonomi bangsa yang lebih kuat. Oleh sebab itu, sekali lagi dikemukakan bahwa demokrasi ekonomi juga mengandung arti bahwa basis daya saing ekonomi berpusat pada rakyat. Bukan terpusat hanya kepada sekelompok pelaku ekonomi kuat yang memiliki aksesibilitas relatif lebih baik terhadap pasar, modal, teknologi, informasi maupun sumber daya manusia yang berkualitas.

D.2. Menciptakan Distribusi Demokratis

Dalam menghadapi milenium ketiga yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, perhatian kita semakin terfokus pada kemampuan dan daya saing perekonomian bangsa kita. Hal ini terutama menyangkut masalah [1] produksi dan [2] sistem kelembagaan bisnis dalam negeri. Dari sisi produksi, kita ditantang untuk terus menerus meningkatkan [1] kuantitas, [2] mutu, dan [3] ketepatan waktu penyerahannya. Di samping itu penentuan tingkat harga yang kompetitif juga perlu dilakukan dengan terus meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Dukungan pasar juga perlu dimantapkan dengan menanamkan dan menumbuhkan nilai budaya bangsa untuk lebih menghargai buatan sendiri [dalam negeri]. Seluruh hal ini dimaksudkan agar produksi dalam negeri memiliki basis yang kuat sebelum bersaing dengan produksi luar negeri.

Namun di sisi lain, sistem distribusi nasional kita masih menghadapi masalah utama. Masalah ini terletak pada mekanisme pengambilan keputusan di tingkat produsen dan distributor. Oleh karenanya, berbagai bentuk hubungan produsen-distributor dalam menentukan harga dan jumlah pasokan, termasuk prosedur penunjukan distributor, perlu mendapat perhatian yang sangat serius.

Dari sudut pandang struktur pasar, khususnya pada tatanan hubungan produsen-distributor, kita dapat mengamati masalah utama tersebut dari dua pola distribusi yang terjadi di Indonesia.

Pertama, adalah suatu sistem distribusi yang para produsennya relatif kurang berdaya menghadapi distributor. Berbeda dengan jumlah produsen, jumlah pembeli/distributor sangat sedikit [monopolistik], sehingga distributor sangat kuat dalam menentukan naik-turunnya harga. Misalnya dalam sistem distribusi padi/beras dan gula. Jumlah pembeli/distributor sangat sedikit di tingkat petani. Bahkan kita sering menyaksikan kehadiran bulog menjadi satu-satunya pembeli. Dan, apabila Bulog tidak mengambil peran maka diduga petani akan sulit menjual produknya.

Kedua, adalah sistem distribusi yang jumlah produsennya sangat sedikit, sehingga keputusan tentang tingkat harga dan jumlah pasokan mulai dari distributor hingga ke konsumen, termasuk penunjukan distributor, berada di tangan produsen. Kebanyakan produk industri manufaktur dan barang impor menghadapi pola distribusiseperti itu. Misalnya, minyak goreng, terigu, kedelai dan sebagainya.

Ada kesamaan dari kedua pola distribusi tersebut karena keduanya ternyata melahirkan suatu konsep monopoli, terutama di tingkatan distributornya. Inilah akar permasalahan dalam sistem distribusi nasional. Tetapi, bagaimanapun bentuk mekanismenya, fakta menunjukkan bahwa kebanyakan distributor di Indonesia memiliki monopoly power. Distributor memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi dari pada lembaga distribusi di bawahnya, termasuk retailer.

Dengan lahirnya distributor yang memegang kekuatan monopoli di

berbagai jenis produk, maka posisi subdistributor [kalau ada] dan retailer, yang pada umumnya adalah pengusaha kecil, menengah dan koperasi, menjadi sangat lemah. Demikian juga konsumen. Mereka menjadi sangat tertekan karena pasokan tidak lancar, tingkat harganya relatif tinggi dan tidak stabil. Keuntungan yang dinikmati distributor plus margin distribusi sangat tinggi sehingga terjadi *high-cost-distribution* yang kemudian mengakibatkan *high-cost-economy*.

Kondisi semacam ini jelaslah merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam wujud harga-harga yang lebih tinggi di atas batas harga yang wajar di samping ketidakpastian jaminan terhadap ketersediaan barang. Oleh karena itu, harus dicari langkah-langkah tepat yang kongkrit untuk memecahkannya.

Dalam kaitan ini, alternatif yang mungkin ditempuh untuk memecahkan situasi yang merugikan kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama, penataan kembali struktur pasar di tingkat hubungan produsen distributor. Terutama untuk menegakkan iklim persaingan yang lebih sehat, adil dan transparan. Dalam kaitan ini, adanya peraturan perundang-undangan semacam Undang-Undang Persaingan Sehat, dan terutama penegakkannya di lapangan secara adil dan tanpa pandang bulu, menjadi vital sifatnya.

Kedua, pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk berfungsi maksimal

dalam sistem distribusi nasional. Kesempatan ini tidak dibatasi hanya kepada satu atau sejumlah tertentu koperasi, pengusaha kecil dan menengah, melainkan terbuka luas bagi setiap koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Namun demikian, kesempatan yang luas tersebut harus diikuti dengan bantuan penguatan dari pemerintah kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah tadi. Tetapi penguatan yang dimaksud bukan fasilitas yang sifatnya cuma-cuma dan permanen. Penguatan tersebut harus difokuskan pada upaya untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu secara bersama menghasilkan ekonomi yang sehat. Satu kesempatan yang sangat besar artinya bagi rakyat dan bangsa Indonesia khususnya dalam menghadapi era globalisasi. Kemampuan daya saing itu akan lahir hanya apabila koperasi, pengusaha kecil dan menengah memiliki antara lain SDM yang bermutu, menguasai teknologi tepat guna, menguasai informasi bisnis yang luas, menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern, serta memiliki jaringan bisnis yang kuat. Penguatan yang diarahkan untuk semakin memberdayakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama dan mendesak dilaksanakan.

Ketiga, adanya upaya membangun kerjasama strategis antara usaha besar, menengah dan kecil yang benar-benar ditegakkan atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan. Misalnya melalui kerjasama kemitraan usaha yang telah

memperoleh sambutan luas dari masyarakat. Melalui kerjasama strategis tersebut diharapkan terjadi proses pembagian kerja [division of labor] yang lebih efisien dalam sistem distribusi nasional, terutama dalam menghadapi luasnya wilayah dan persebaran penduduk yang belum sepenuhnya merata.

Kerjasama strategis melalui bentuk semacam kemitraan usaha ini, berdasarkan pengamatan empirik, sudah menjadi gejala umum [common strategy] bagi dunia usaha di seluruh dunia. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Kanada, kerjasama strategis semacam kemitraan usaha tumbuh dan berkembang luas di seluruh lini bisnis. Selain itu, kerjasama strategis semacam kemitraan dapat berfungsi sebagai *preventive mechanism* untuk menghindarkan terjadinya praktek-praktek monopolistik yang merugikan masyarakat. Karena dengan adanya kerjasama strategis demikian, selain melahirkan pembagian kerja pada berbagai bidang dan sektor usaha yang lebih proporsional di antara pelaku usaha, juga akan dapat lebih meningkatkan keberdayaan para pelaku usaha sehingga tercipta kondisi persaingan yang lebih seimbang, yang pada gilirannya dapat menghindarkan dunia usaha dari kecenderungan monopolistik dalam perilaku bisnisnya.

Dalam hubungan inilah, beberapa pakar ekonomi dari Amerika Serikat [seperti Roy Nordan, Brandenburger dan Nalebuff] mengajukan model ekonomi baru yang dikembangkan dalam game theory dengan istilah *coopetition* atau *koopetisi*. Dengan model baru tersebut, diluncurkan

suatu proposisi di mana para pengusaha tidak selalu harus menghadapi persaingan dengan cara persaingan frontal yang akan menciptakan win-lose situation sehingga cenderung berdampak jatuhnya korban. Situasi menang kalah yang menelan korban dapat dihindari melalui alternatif kerjasama strategis berdasarkan prinsip *coopetition*. Misalnya, melalui mekanisme kemitraan usaha, di mana para pengusaha tersebut mampu mengendalikan dan mengurangi ketidakpastian lingkungan usaha. Hal ini adalah karena dalam *koopetisi*, nilai-nilai positif yang terkandung dalam *cooperation* dan *competition* dapat lebih dipadukan sehingga merupakan *win-win strategy* dalam menghadapi persaingan di pasar.

Dalam kaitan ini, pemerintah pada dasarnya dapat berperan untuk memantapkan sistem distribusi nasional, apalagi dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Melalui pengaturan dan penegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan, keputusan harga dan kuantitas produk diambil dalam suatu mekanisme pasar yang bersaing sehat.

Memang, dalam mekanisme pasar bebas, pemerintah menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi, tuntutan *free trade investment* yang diimplementasikan melalui mekanisme penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, dihindarinya proteksi dan perlakuan *entry and exit* yang sama terhadap seluruh pelaku, produk dan jasa yang masuk ke pasar, menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan intervensi sebagaimana masa-masa sebelum era perdagangan bebas.

Di sisi lain, dalam menghadapi situasi pasar yang cenderung monopolistik dan merugikan masyarakat ini, pemerintah tetap berkewajiban untuk mendorong berkembangnya mekanisme persaingan pasar yang sehat dalam sistem distribusi nasional. Untuk itu, pemerintah harus tetap melaksanakan fungsinya tanpa melanggar tuntutan paradigma global tersebut. Dalam hal demikian, peran yang mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang efektif dan efisien. Fungsi ini terutama diarahkan untuk menciptakan kondisi-kondisi [*conditioning*] yang memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan alternatif pemecahan masalah di atas. Cara ini tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan bebas, karena peran pemerintah demikian ini sifatnya tidak langsung.

Upaya ini bahkan dapat dikatakan sesuai dengan semangat persaingan sehat yang menjadi jiwa era pasar bebas, yang tidak mungkin tercipta tanpa adanya keseimbangan kekuatan di antara para pelaku pasar dalam suatu persaingan yang sehat [*perfect competition*]. Yang perlu dicatat adalah pemerintah baru bias masuk ke pasar dan melakukan intervensi sebagai regulator maupun fasilitator, hanya apabila pasar mengalami kegagalan [*market failures*]. Intervensi inipun harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena tidak semua kegagalan pasar disebabkan oleh tidak berfungsinya pasar itu sendiri. Tetapi, bisa terjadi karena faktor penyebab lainnya, misalnya seperti adanya kebijakan pemerintah terhadap pasar yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasar yang

terus bergerak dinamis.

Selain peran pemerintah, inisiatif dan partisipasi aktif para pengusaha kecil, menengah dan koperasi pelaku distribusi itu sendiri dalam memberdayakan dirinya tentulah sangat menentukan. Terutama karena mereka inilah subyek sebenarnya dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Peluang dan kesempatan, baik yang tercipta melalui conditioning yang diupayakan pemerintah maupun yang muncul sebagai akibat perkembangan yang wajar dari semakin majunya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, telah tersedia.

Permasalahan berpulang kepada mereka, apakah siap untuk ikut berkiprah sebagai produsen dalam pasar global yang penuh persaingan ketat, ataukah cukup puas hanya sekedar menjadi konsumen bagi produk-produk orang lain yang lebih kwalitatif dan kompetitif.

D.3. Strategi Penghapusan Kesenjangan

Strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sudah dimulai semenjak Pelita III. Strategi ini sejalan dengan amanat GBHN bahwa arahan dan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kesenjangan yang menjadi eksese dari pembangunan selama ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga saat ini telah mencapai hasil yang dapat dirasakan bersama. Setidaknya orientasi pertumbuhan tinggi yang bertolak dari industrialisasi telah mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor industri khususnya industri manufaktur dan jasa, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai tenaga kerja, meningkat pesat.

Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, yang ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian [tradisional] dan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa [modern]. Perubahan-perubahan yang positif terjadi adalah meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya kualitas kesehatan, membaiknya pendidikan penduduk, dan majunya tingkat kecerdasan umum masyarakat.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa selain berbagai kemajuan di atas, pertumbuhan yang tinggi tersebut meninggalkan eksese berupa kesenjangan akibat kurangnya perhatian terhadap aspek pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya. Kenyataan dan perkembangan inilah yang mendorong ditetapkan orientasi pemerataan semenjak Pelita III, misalnya melalui program Delapan Jalur Pemerataan yang diharapkan dapat mengurangi berbagai kesenjangan yang menjadi eksese pembangunan selama ini.

Kesenjangan yang terjadi umumnya bersumber dari timpangnya pendapatan antar anggota masyarakat, akibat tidak meratanya aksesibilitas atau penguasaan terhadap aset ekonomi produktif, seperti aksesibilitas terhadap permodalan, teknologi, manajemen maupun sumber daya manusia yang berkualitas. Laporan Bank Dunia [1993] mensinyalir adanya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi dalam perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya monopoli baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Akibatnya muncul dualisme dalam pembangunan nasional: sektor ekonomi besar [industri manufaktur dan jasa] berkembang pesat, sementara sektor ekonomi kecil dan menengah [pertanian dan industri rumah tangga] berkembang sangat lambat. Dualisme dan kesenjangan semacam ini muncul antara lain karena orientasi pembangunan ekonomi [industrialisasi] yang berlangsung selama ini lebih berbasis kepada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat.

Dalam hubungan ini kita dapat belajar dari pengalaman Taiwan, yang justru menunjukkan perekonomiannya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah besar usaha kecil dan menengah yang disebut *community based industry* atau industri berbasis ekonomi rakyat. Perkembangan industri modern di Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri dan dinamis.

Pengalaman Taiwan tersebut bertolak belakang dengan apa yang

berlangsung di negara kita: usaha kecil, menengah dan koperasi yang melibatkan sebagian besar rakyat kurang memperoleh peluang dan keberpihakan untuk mampu berkembang dinamis. Akibatnya kontribusi usaha kecil, menengah dan koperasi untuk ikut menopang ekonomi nasional dalam memasuki persaingan global tetap kurang memuaskan.

Hal ini terlihat pada kenyataan di mana sampai dengan akhir Pelita VI terdapat lebih dari 34,27 juta pengusaha di seluruh Indonesia, sekitar 99,8% dari jumlah itu merupakan pengusaha kecil, dan sisanya 0,2% adalah pengusaha menengah dan besar. Gambaran demikian cukup menunjukkan kepada kita adanya kesenjangan cukup memprihatinkan yang terjadi selama ini.

Padahal apabila kita kembali kepada arahan konstitusi dan amanat GBHN di atas, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menghapus kesenjangan ini dan bukan sebaliknya, yang menjauhkan pembangunan dari cita-cita yang digariskan bersama, yakni kemakmuran seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok. Dengan demikian maka atas dasar logika ekonomi kerakyatan, pembangunan seharusnya mengarahkan strategi pembangunan untuk dipusatkan pada bagian besar pengusaha dan termasuk dalam kategori pengusaha kecil dan koperasi.

Mereka itulah rakyat yang mempunyai hak penuh atas perekonomian negara ini. Ini tidak berarti bahwa segala dana dan daya semuanya harus ditanamkan pada pembangunan pengusaha kecil semata. Pembangunan yang megutamakan pengusaha kecil tidak berarti

harus menelantarkan sektor usaha skala besar. Pembangunan besar-besaran usaha kecil justru memerlukan dukungan dan bantuan industri besar yang maju dan modern. Adanya industri atau usaha skala besar yang maju dan modern diperlukan untuk membangkitkan keunggulan-keunggulan tertentu, misalnya dalam mendorong pertumbuhan, adopsi teknologi modern dan juga memasuki ekonomi global. Hanya saja sifat maupun arah pembangunan usaha skala besar haruslah terkait dan dapat menghela pertumbuhan dan perkembangan usaha skala kecil. Selama ini terasa bahwa keterkaitan usaha [*industrial linkage*] antara usaha besar dengan usaha menengah dan kecil sangat lemah.

Pertumbuhan tinggi yang terjadi pada perusahaan besar tidak secara otomatis menghela pertumbuhan usaha kecil dan menengah, akibat putusnya keterkaitan antara keduanya. Mengaitkan kembali hubungan antara usaha skala besar dan usaha skala menengah dan kecil, merupakan agenda penting dalam upaya mendorong ekonomi rakyat yang bermuara pada demokrasi ekonomi. Upaya pemerintah untuk mendorong kemitraan usaha jelas tidak terlepas dari latar belakang pemikiran semacam itu. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan indikator pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja. Pembangunan juga berarti membangun kesadaran atau kehendak dari seluruh rakyat untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai macam tekanan yang menghambat kemajuan.

Membangun juga berarti membangun martabat dan harga diri yang

tinggi dan wajar, menimbulkan rasa percaya diri yang kuat, serta selalu berorientasi pada inovasi-inovasi dan pembaharuan, inisiatif dan keberanian mengambil risiko dari seluruh rakyat. Dengan cara demikian kesenjangan ekonomi yang menghasilkan struktur masyarakat yang dualistik secara berangsur-angsur terkikis habis. Dan, sebaliknya akan tumbuh suatu struktur ekonomi yang ditopang oleh kekuatan lapisan usaha berskala menengah yang tangguh dalam jumlah yang memadai. Dengan kerangka berpikir seperti di atas kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa koperasi dan pengusaha kecil merupakan pelaku dominan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi.

Beberapa alasan untuk menempatkan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting ekonomi rakyat dalam upaya mendorong proses demokratisasi ekonomi antara lain disebabkan oleh: Koperasi dan usaha kecil jumlahnya sangat besar mendominasi seluruh jumlah pengusaha yang ada, terdapat hampir di semua sektor dan tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Hal ini sangat penting artinya untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai wahana mempercepat proses pemerataan, baik pemerataan antar sektor maupun antar wilayah. Selain itu usaha berskala kecil termasuk usaha anggota koperasi umumnya sangat bersifat fleksibel karena skala usahanya yang tidak terlalu besar serta kesederhanaan spesifikasi teknologi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan usaha berskala kecil untuk mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan

lingkungan eksternal yang terjadi. Kemudian, karena sifat penyebaran yang luas, koperasi dan usaha kecil juga sangat berperan dalam proses pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha. Di negara-negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat dan Jepang, sektorusaha berskala kecil justru menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan usaha-usaha berskala besar. Untuk kasus Amerika Serikat misalnya, antara kurun waktu tahun 1987-1992, hampir 100% lapangan kerja baru diciptakan oleh usaha-usaha kecil [*Small Medium Enterprises/SMEs*] dan sekitar 55% inovasi baru juga disumbangkan oleh usaha-usaha berskala kecil, usaha berskala kecil juga memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menopang usaha-usaha berskala besar. Dengan demikian peranan usaha berskala kecil juga sangat penting dalam mendukung proses industrialisasi. Keterkaitan usaha berskala besar dengan usaha berskala kecil dalam pengembangan industrialisasi dapat dikembangkan dalam bentuk atau model industri satelit. Artinya perusahaan berskala besar didukung oleh beribu-ribu usaha berskala kecil sebagai satelitnya. Bila model semacam ini dapat dikembangkan, maka struktur industri nasional akan lebih kuat menghadapi persaingan global, Perkembangan koperasi dan usaha kecil biasanya juga secara langsung sangat terkait dengan upaya memecahkan masalah-masalah keterbelakangan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu alasan untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai upaya untuk mengentaskan keterbelakangan masyarakat tidak lain karena

memang koperasi dan usaha kecil lebih dekat dan lebih sesuai dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah [*grass roof*].

Bila pengembangan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting dari sistem perekonomian nasional berhasil diwujudkan dalam bentuk keterkaitan yang saling menguntungkan dengan keseluruhan sistem usaha nasional, maka selain dapat dicapai upaya mempercepat pemerataan juga sekaligus akan mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kita yakin bahwa koperasi dan pengusaha kecil bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya akan mampu menghadapi tantangan dan menangkap peluang yang diakibatkan oleh perubahan tatanan ekonomi dunia di masa depan.

D.4. Realokasi Aset Guna Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat

Krisis yang sedang melanda bangsa kita sekarang ini selain disebabkan pengaruh eksternal akibat trend resesi ekonomi dunia yang bergerak ke arah depresi, juga disebabkan oleh kondisi internal perekonomian kita sendiri. Yakni tidak cukup kuatnya fundamental perekonomian kita untuk menahan gempuran efek domino krisis moneter di kawasan Asia Tenggara yang bermula dari krisis di Thailand. Krisis moneter ini kemudian meluas menjadi krisis ekonomi secara keseluruhan, dan akhirnya berlanjut menjadi krisis kepercayaan terhadap kemampuan negara [pemerintah] dalam menghadapi krisis dan menyelesaikannya.

Lebih jauh, apabila direnungkan secara mendalam, kebijakan

pembangunan kita selama ini memang cenderung menumbuhkan kelas-kelas ekonomi besar tanpa diimbangi dengan kelas-kelas ekonomi kecil dan menengah yang kuat dan mandiri. Dari kebijakan semacam ini, terciptalah struktur perekonomian yang dapat diibaratkan seperti bangunan rumah yang atapnya berat tetapi ditopang oleh tiang dan pondasi yang rapuh. Akibatnya, rumah ekonomi kita mudah goyah ketika diterpa oleh gempuran angin topan dahsyat karena tiang dan pondasinya tidak cukup kuat dalam menyangga beban atap yang telah lebih dulu goyah.

Struktur perekonomian semacam ini, terutama disebabkan oleh proses penguasaan aset produktif dari hulu sampai hilir dalam wujud kartel yang berbasis konglomerasi, melalui konsentrasi modal, teknologi, informasi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akibatnya, terciptalah persaingan pasar tidak sempurna [*imperfect competition*] yang ditandai adanya konsentrasi asset ekonomi produktif berada pada sekelompok kecil usaha besar. Sebaliknya, usaha skala kecil termasuk koperasi yang jumlahnya sangat besar dan bekerja pada pasar yang sangat kompetitif, lemah dalam hal akses terhadap aset ekonomi produktif.

Tanpa didukung prasyarat yang memadai bagi terwujudnya mekanisme pasar yang bersaing secara sempurna, maka timbulnya berbagai praktek-praktek persaingan tidak sehat akan sulit dicegah. Akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran

rakyat yang adil dan merata tidak tercapai. Menghadapi hal tersebut, satu-satunya alternatif adalah melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan, pelaksanaan, strategi hingga praktek ekonomi dan politik yang secara moral, konsepsional dan operasional sudah tidak sejiwa, seirama, dan selaras lagi dengan tuntutan demokratisasi sebagai prasyarat berjalan sempurnanya pasar [*perfect competition*]. Kesempurnaan pasar merupakan instrumen paling ideal dalam mewujudkan tujuan normative pembangunan yang dicita-citakan, yakni kemakmuran seluruh lapisan masyarakat bukan kemakmuran sekelompok atau orang-seorang.

Aset-aset ekonomi produktif, dalam wujud permodalan, informasi, teknologi, dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, yang selama ini secara terbatas diakses oleh kelompok-kelompok tertentu, harus dialokasikan kembali [realokasi aset] sesuai dengan tuntutan pemerataan, keadilan dan bertujuan memakmurkan rakyat secara keseluruhan bukan orang seorang atau kelompok.

Realokasi aset tersebut harus menghindari cara-cara yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan ekonomi rakyat secara luas, bahkan sebaliknya realokasi selain harus dapat menjadi instrumen penguatan basis-basis ekonomi rakyat, juga harus berperan sebagai instrumen pemulihan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, cara-cara berkonotasi revolusioner semacam nasionalisasi, dan cara-cara lain yang berindikasi pelanggaran hak-hak asasi manusia [HAM] dan berdampak instabilitas serta menciptakan rasa tidak aman dalam diri

masyarakat, harus dihindari sejauh mungkin. Realokasi aset dapat dilakukan melalui pendekatan dua arah yang terpadu secara integratif: dari atas [pemerintah] dan dari bawah [masyarakat sendiri]. Pendekatan dari atas [inisiatif dari pemerintah] dilakukan para elit kekuasaan [pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya] dengan mencanangkan restrukturisasi bangunan ekonomi nasional, yang ditujukan untuk mencairkan konsentrasi aset dan menata kembali pengalokasiannya kepada seluruh sektor ekonomi secara adil dan proporsional, dengan memberikan prioritas kepada basis-basis ekonomi rakyat [usaha kecil dan koperasi] untuk memiliki akses yang lebih baik dari sebelumnya. Instrumen ini antara lain dibuat dengan cara mengundang peraturan tentang persaingan sehat, penguatan usaha kecil, menengah dan koperasi. Atau, bentuk lain seperti penghapusan perlindungan dan subsidi bagi usaha besar, termasuk pembatasan lingkup usaha. Secara tegas, pemerintah harus menegakkan *law enforcement* terhadap pusat-pusat permodalan maupun institusi terkait lainnya untuk merealisasikan dukungan kepada kalangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Dukungan tersebut baik dukungan permodalan, pembinaan sumber daya manusia, manajemen usaha, penguasaan technical know-how, maupun syarat-syarat kewirausahaan lainnya.

Dengan demikian konsentrasi aset tersebut dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada kartel maupun bentuk struktur ekonomi yang distortif dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Melalui

instrumen perundang-undangan pula, maka akses terhadap perbankan dan sektor finansial lainnya yang menjadi sumber permodalan usaha, dapat diprioritaskan kepada usaha kecil sehingga memiliki kemampuan untuk memasuki sektor-sektor usaha yang selama ini tertutup akibat ketidakberdayaan permodalannya. Demikian pula dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui pembinaan manajemen, keterampilan dan jaringan informasi serta teknologi yang akan memberikan kemampuan pada usaha kecil untuk memperluas dan mengembangkan *scale of economy* sesuai dengan kapasitas, ruang lingkup dan bidang usahanya.

Redistribusi aset melalui pendekatan dari bawah [inisiatif masyarakat sendiri] mensyaratkan adanya inisiatif dari kalangan masyarakat [pelaku usaha kecil] untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memperkuat basis usahanya, antara lain misalnya dengan melakukan kerjasama-kerjasama dalam bentuk networking usaha, misalnya dalam bentuk asosiasi dan koperasi.

Adanya networking ini akan memberikan keuntungan-keuntungan terhadap para pelaku usaha kecil: pertama, para pelaku usaha kecil dapat saling memperkuat basis usahanya, yang akhirnya akan menciptakan peluang sebesar-besarnya dari mereka sendiri untuk memperbesar *scale of economy* daripada usahanya sendiri.

Kedua, para pelaku usaha kecil dapat saling menukar informasi tentang peluang-peluang usaha baru, yang dapat ditindaklanjuti dengan

membentuk usaha-usaha bersama. Akibatnya, secara bertahap mereka akan semakin mampu melakukan penetrasi pasar dan meningkatkan aset usahanya. Dengan keuntungan-keuntungan di atas, pada gilirannya para pelaku usaha kecil akan mampu meraih keuntungan ketiga, yakni dengan membentuk *networking*. Para pelaku usaha kecil sekaligus dapat membangun semacam kekuatan penyeimbang [*countervailing power*] terhadap kekuatan ekonomi besar [konglomerasi] yang secara monopolistik menguasai pasar dan menyebabkan terjadinya distorsi pasar yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Kemampuan para pelaku usaha untuk membangun *countervailing power* terhadap penguasaan pasar secara monopolistik oleh pelaku usaha besar, merupakan tahapan terpenting dari kebutuhan akan adanya suatu *trend of balance* oleh kekuatan ekonomi non-monopolistik-oligopolistik terhadap perilaku pasar ekonomi monopolistik-oligopolistik yang merupakan cermin adanya konsentrasi aset secara tidak sehat pada sekelompok tertentu dari pelaku ekonomi besar.

Selain sebagai *countervailing power*, jaringan-jaringan usaha [*business networking*] yang dibentuk para pelaku usaha kecil secara tidak langsung juga akan mendorong proses realokasi aset ekonomi produktif dari kalangan usaha besar kepada kalangan usaha kecil. Selanjutnya juga akan terjadi kerjasama yang langgeng sehingga melahirkan keuntungan keempat, kalangan usaha kecil dan koperasi memperoleh back-up power bisnis dengan dukungan permodalan dan jaringan usaha yang cukup

untuk berkembang. Kelima, kalangan koperasi memperoleh kesempatan untuk memperbesar asset usahanya melalui perubahan komposisi struktur kepemilikan sahamnya dalam kerjasama kemitraan tersebut. Komposisi kepemilikan saham koperasi secara bertahap akan merubah bentuk dari minoritas menjadi mayoritas melalui pengalihan saham, sesuai dengan perjanjian pada awal kerjasama antara keduanya.

Dengan kerjasama kemitraan ini koperasi dapat melakukan *empowering* terhadap dirinya sendiri melalui berbagai keuntungan di atas. *Empowering* tersebut terutama ditopang oleh kemampuan koperasi yang semakin meningkat dalam hal manajemen, *skill technical know-how*, struktur permodalan, akses informasi, diversifikasi usaha dan perluasan pangsa komoditas melalui penetrasi pasar. Secara langsung, pola demikian dapat merupakan proses realokasi aset dari kalangan ekonomi kuat kepada kalangan ekonomi lemah [koperasi], yang berlangsung secara damai, tidak saling mematikan bahkan saling membesarkan. Hal ini dimungkinkan karena proses realokasi aset tersebut dilakukan melalui mekanisme kerjasama kemitraan yang berlangsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan.

Dengan makin kuatnya basis-basis ekonomi rakyat, diharapkan sinergi ekonomi dan bisnis nasional kita dapat bergerak dinamis, dan selanjutnya pasar secara gradual dan sistematis akan berproses mencapai mekanisme persaingan yang terbaik [*perfect competition*]. Para pelaku di dalamnya dapat bersaing secara fair dan berdaya tawar relatif

seimbang, karena perbedaan *power of competition* di antara mereka tidak terpaut tajam. Dengan makin seimbang power of competition antar berbagai sektor dan pelaku ekonomi, maka kontrol terhadap *entry and exit* akan menyertakan semua pihak—bukan hanya sekelompok tertentu—sehingga distorsi harga dapat diminimalisir. Hal ini akan menghasilkan tingkat harga yang wajar, yang pada gilirannya akan menguntungkan rakyat dengan jaminan terhadap ketersediaan barang dan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli mereka dan konsumen. Dengan demikian, sinergisitas pertumbuhan-pemerataan stabilitas dapat berlangsung dinamis dan wajar, bukan melalui rekayasa yang menghasilkan pencapaian yang sifatnya artifisial. Inilah wujud nyata dari prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang paling dimungkinkan. Secara langsung, proses demikian adalah Reformasi Ekonomi yang sedang menjadi kebutuhan dan titik perhatian paling krusial dari kehidupan bangsa saat ini.

D.5. Dasar Konstitusi Ekonomi Rakyat

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan

kata, pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas.

Selanjutnya dalam semua GBHN terutama tahun 1993 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat. Partisipasi dalam ikut serta proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

Dengan demikian, dalam pembangunan bidang ekonomi, harus dihindari adanya liberalisasi dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku ekonomi. Sebaliknya harus saling bekerjasama dalam suasana kekeluargaan.

Oleh karena itu secara tegas UUD 1945 dan GBHN menggariskan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil. Bertitik tolak dari arahan UUD 1945 dan GBHN tersebut, pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai usaha/kerja dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri. Di lain pihak, pengusaha kecil harus unggul sebagai pelaku ekonomi yang mampu menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional yang mungkin dimasuki oleh koperasi dan pengusaha kecil.

Lebih lanjut dalam rangka menata struktur ekonomi nasional yang

lebih berimbang antar kekuatan pelaku ekonomi, maka GBHN 1993 secara tegas menggariskan perlunya upaya untuk mengembangkan kemitraan usaha antar berbagai unsur pelaku ekonomi nasional, terutama antar pelaku ekonomi yang kuat dengan yang lemah. Kemitraan usaha nasional perlu untuk dikembangkan atas dasar saling membantu, saling menguntungkan sebagai perwujudan kesatuan ekonomi nasional yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terdapat paling sedikit dua prasyarat pokok yang sangat penting sebagai hakikat demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 dan GBHN. Pertama, adalah tujuannya yaitu kemakmuran seluruh rakyat. Kedua, adalah perlunya keterlibatan dan partisipasi rakyat banyak baik dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasilhasilnya. Kedua prasyarat pokok tersebut kemudian menentukan sifat dari alokasi sumber daya. Sifat pertama adalah adanya suatu mekanisme untuk mempertinggi kemakmuran. Kedua adalah adanya suatu mekanisme agar penguasaan faktor produksi lebih tersebar kepada sebagian besar rakyat. Dua hal inilah yang menentukan derajat pendemokrasian suatu ekonomi.

Bertolak dari pengalaman negara-negara lain manakala penguasaan faktor produksi lebih terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok, maka dalam kebanyakan kasus proses pemerataan kemakmuran berlangsung agak lambat. Karena itu sesungguhnya pemerataan kemakmuran lebih ditentukan oleh penguasaan faktor produksi.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dalam mengalokasikan faktor produksi tersebut? Sejak semula kita telah mengakui bahwa mekanisme pasar merupakan suatu cara untuk maksud tersebut. Kita mempercayai bahwa pada suatu tingkat tertentu hukum penawaran dan hukum permintaan merupakan cara efisien untuk mendorong proses alokasi sumber daya yang efektif. Pasar yang dapat bersaing secara sempurna akan mampu mendistribusikan faktor produksi dan selanjutnya hasil-hasilnya dapat memberikan kemakmuran yang tinggi dan adil kepada masyarakat. Namun demikian dalam prakteknya kita juga menyadari berbagai ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Untuk mewujudkan pasar yang bersaing sempurna diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya jumlah pembeli dan penjual seimbang sehingga tidak ada pelaku ekonomi di pasar yang dapat mempengaruhi harga. Lalu, adanya kebebasan barang masuk dan keluar atau ke dan dari pasar. Kemudian, barang dan jasa yang diperdagangkan homogen, informasi yang ada dapat diterima secara sempurna oleh semua pelaku ekonomi di pasar, dan adanya kelancaran mobilitas sumber daya manusia.

Dalam kenyataannya berbagai persyaratan ini sulit terpenuhi, sehingga pasar yang ideal tersebut tidak terwujud. Sebaliknya, di sana-sini terjadi distorsi. Akibatnya, bukan pemerataan yang kita dapatkan melainkan pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi dalam banyak kasus membawa dampak negatif. Ada kecenderungan menengah pada praktek-praktek ekonomi anti kompetisi, penetapan harga lebih tinggi dengan

penawaran barang dan jasa lebih sedikit, timbulnya praktek-praktek bisnis yang eksklusif, maupun praktekpraktek diskriminasi harga. Dalam kondisi seperti itu, juga pengalaman negara lain, akhirnya mengundang keterlibatan negara. Jika suatu faktor produksi sangat terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil, yang karenanya mengakibatkan kesenjangan-kesenjangan di sisi pemerataan, maka negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mekanisme alokasi yang lebih benar dan adil.

Pada cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan secara langsung negara menguasainya. Tidak jarang pula penguasaan itu dapat bersifat monopoli. Namun demikian merupakan bentuk monopoli yang diatur, misalnya patokan harganya harus cukup rendah agar terjangkau rakyat banyak, dan jumlah barangnya cukup besar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada sebagian besar masyarakat. Jelaslah bahwa di dalam demokrasi ekonomi, tujuannya adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

Rakyat mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama guna terlibat langsung di dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasilhasilnya. Dalam demokrasi ekonomi penguasaan faktor produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme alokasi faktor produksi itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang dikelola oleh negara.

Selebihnya, antara demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Sebab, salah satu prasyarat

pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat.

Alhasil, ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat.

Para pendiri Republik ini telah meletakkan dasar-dasar yang jelas. Dilihat dari faktor sejarah bahwa para pendiri negara ini merumuskan dasar-dasar negara dilatarbelakangi oleh situasi adanya kesenjangan antara lapisan atas yang lebih beruntung dengan sejumlah besar lapisan bawah yang kurang beruntung pada waktu itu.

Tugas kita adalah menafsirkan kembali dan menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk masalah kekinian yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam hal ini tentu kita tidak dapat menghindarkan diri dari tugas untuk memperhatikan dan memusatkan perhatian pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang beruntung. Hal ini membawa konsekuensi, baik strategi maupun program pembangunan, harus memusatkan daya-upaya perbaikan nasib rakyat yang berada dalam keadaan materiil maupun spirituil agak terbelakang. Saat ini terdapat lebih dari 34,27 juta pengusaha di seluruh Indonesia, sekitar 99,8% dari jumlah

itu merupakan pengusaha kecil, dan sisanya 0,2% adalah pengusaha menengah dan besar.

Dengan demikian logika ekonomi kerakyatan, seharusnya mengarahkan strategi pembangunan untuk dipusatkan pada sebagian besar pengusaha yang berstatus pengusaha kecil tersebut. Mereka itulah rakyat yang mempunyai hak penuh atas perekonomian negara ini. Ini tidak berarti bahwa segala daya-upaya sepenuhnya harus ditanam pada pembangunan pengusaha kecil semata. Pembangunan yang mengutamakan pengusaha kecil tidak berarti harus menelantarkan sektor usaha skala besar. Pembangunan besarbesaran usaha kecil justru memerlukan dukungan dan bantuan industri besar yang maju dan modern. Adanya industri atau usaha skala besar yang maju dan modern diperlukan untuk membangkitkan keunggulan-keunggulan tertentu, misalnya dalam mendorong pertumbuhan, adopsi teknologi modern dan juga memasuki ekonomi global.

Hanya saja sifat maupun arah pembangunan usaha skala besar haruslah terkait dan dapat menghela pertumbuhan dan perkembangan usaha skala kecil. Selama ini terasa bahwa keterkaitan usaha [industrial linkage] antara usaha besar dengan usaha menengah dan kecil sangat lemah.

Pertumbuhan tinggi yang terjadi pada perusahaan besar tidak secara otomatis menghela pertumbuhan usaha kecil dan menengah, akibat putusnya keterkaitan antar keduanya. Mengkaitkan kembali

hubungan antara usaha skala besar dengan usaha skala menengah dan kecil, merupakan agenda penting dalam upaya mendorong ekonomi rakyat yang bermuara pada demokrasi ekonomi. Upaya pemerintah untuk mendorong kemitraan usaha jelas tidak terlepas dari latar belakang pemikiran semacam itu.

Pertumbuhan ekonomi memang merupakan indikator pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja. Pembangunan juga berarti membangun kesadaran atau kehendak dari seluruh rakyat untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai tekanan yang menghambat kemajuan. Membangun juga berarti membangun martabat dan harga diri yang kuat, serta selalu berorientasi pada inovasi-inovasi dan pembaharuan, inisiatif dan keberanian mengambil risiko dari seluruh rakyat.

Dengan cara demikian kesenjangan ekonomi yang menghasilkan struktur masyarakat yang dualistik secara berangsur-angsur terkikis habis. Dan sebaliknya akan tumbuh suatu struktur ekonomi yang ditopang oleh kekuatan lapisan usaha berskala menengah yang tangguh dalam jumlah yang memadai.

Dengan kerangka berpikir seperti di atas, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa koperasi dan pengusaha kecil merupakan pelaku dominan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi.

E. Demokrasi Ekonomi dan Kemiskinan

Irwan Prayitno, 2007 dalam suatu jurnal yang berjudul

Perkembangan Demokrasi Di Indonesia (Cabaran dan Pengharapan) menjelaskan Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislative menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas

berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.

Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan

pengumpulan zakat oleh Negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan.

Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan Negara kuat. Demokrasi di Negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan Negara. Demokrasi di Negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di Negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan Negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat

perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi.

Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik. (Irwan Prayitno, 2007).

F. Substansi Demokrasi Ekonomi

Berlandaskan filosofi dan cita-cita ekonomi dalam konstitusi, Forum Rektor Indonesia (2007) merumuskan substansi demokrasi ekonomi Indonesia, yang mencakup tiga aspek sebagai berikut :

- 1) **Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional.** Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati

kedudukan yang sangat penting dalam demokrasi ekonomi. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

- 2) **Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional.** Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.
- 3) **Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.** Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun

kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (*material capital*), tetapi mencakup pula modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institutional capital*). Sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Negara wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui berbagai upaya sebagai berikut :

- a) **Demokratisasi modal material;** negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.
- b) **Demokratisasi modal intelektual;** negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma. Artinya, dalam

rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.

- c) **Demokratisasi modal institusional**; tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Kemerdekaan anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat sosial dan politik, tetapi meliputi pula serikat-serikat ekonomi. Sebab itu, tidak ada sedikit pun alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota masyarakat untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecil-menengah, serikat kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.

Terkait dengan kontekstualisasi demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, Hamid (2007) memandang bahwa barang yang harus mendapat prioritas utama untuk diproduksi adalah barang-barang dan jasa yang menyangkut kebutuhan dasar (*basic need*) dan memberikan manfaat bagi kepentingan/hajat hidup orang banyak (*public goods*), seperti pangan, sandang, sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk-produk tersebut mendapat prioritas, karena sejalan dengan butir-butir tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 (yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa), pasal 31 dan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, serta sejalan dengan sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima.

Penekanan cara produksi yang berbasis pada prinsip kolektivitas dalam kegiatan perekonomian menurut Hamid nampak tegas terungkap dari ayat-ayat yang terkandung di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut. Terlebih dalam bagian penjelasan diatur bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Masyarakat secara bersama-sama dilibatkan dalam proses produksi, dan dalam hal produksi yang mempunyai arti yang sangat penting (terkait hajat hidup orang banyak), penanganannya langsung di bawah negara. Kata “bersama”, “orang banyak”, dan “kemakmuran rakyat”, melukiskan betapa masyarakat luas menjadi unsur utama dalam

kegiatan perekonomian yang kita harapkan. Inisiatif dan kreativitas individu tidak dibungkam, melainkan dikembangkan dengan melihat sifat produksi dan kepentingan masyarakat. Totaliterisme atau etatisme, sebagaimana lazimnya di negara komunis tidak dapat diterima oleh masyarakat kita.

Masalah ketiga yang selalu ada dalam setiap sistem perekonomian menurut Hamid adalah tentang untuk siapa barang itu dihasilkan dan bagaimana pendistribusiannya. Secara tersirat, hal ini sebenarnya sudah terungkap pada uraian di muka. Karena orientasi produksi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial, maka produksi yang kita hasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas (rakyat banyak), bukan untuk segelintir orang yang kebetulan mempunyai daya beli yang berlebihan. Ini masih ditambah lagi bahwa pendistribusian produksi itu harus bersifat adil dan tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

G. Beberapa Studi Empirik

Ada beberapa studi empirik yang berhubungan dengan demokrasi dan kemiskinan diantaranya adalah :

Ravallion dan Datt (1996) dengan memakai data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer, khususnya pertanian, jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Sektor-sektor terakhir ini tidak

punya efek yang berarti terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan meupun perkotaan.

Kakwani (2001) juga melaporkan hasil yang sama dari penelitiannya untuk kasus Filipina. Dikatakan di dalam studinya bahwa, sementara peningkatan 1 ouput di sektor pertanian mengurangi jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan sedikit di atas 1%, persentase pertumbuhan yang sama dari output di sektor industri dan di sektor jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan antara $\frac{1}{4}$ % hingga $\frac{1}{3}$ %.

Hasil-hasil penemuan di atas mau mengatakan bahwa sektor pertanian sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan di NSB. Bahkan hal ini dinyatakan dengan jelas oleh

Mellor (2000) sebagai berikut : *There has been a tendency to generalize that economic growth reduces poverty when in fact it is the direct and indirect effect of agricultural growth that accounts for virtually all the poverty decline.* Tetapi banyak peneliti-peneliti lain tidak sependapat dengan pandangan di atas tersebut.

Hasan dan Quibria (2002) juga melakukan studi untuk menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor terhadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan data panel dari 45 negara di Asia Timur dan Selatan, Amerika Latin dan Karibian, dan Afrika Sub-Sahara.

Hasilnya menarik untuk dibahas secara garis besar disini. Pertama, plot antara data PN per kapita dan data persentase dari jumlah populasi

yang hidup di bawah garis kemiskinan dari negara-negara yang diteliti memberi kesan yang kuat bahwa ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan per kapita semakin rendah tingkat kemiskinan; atau dalam perkataan lain, negara-negara dengan tingkat PN per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat PN per kapitanya lebih rendah.

Pada awal orde baru tahun 1966 lalu, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia hanya sekitar 50 dollar AS per tahun, dan lebih dari 80% dari populasi hidup di perdesaan atau sektor pertanian, yang kebanyakan adalah petani kecil atau marjinal. Sekitar 60% dari anak-anak di Indonesia tidak bisa menulis dan membaca dan hampir 65% dari penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1969 pemerintah orde baru mulai melaksanakan pembangunan dengan mencanangkan Repelita I, dan sejak itu dengan kebijakan ekonomi terbuka, investasi dan bantuan keuangan dari luar negeri membanjiri Indonesia. Dalam beberapa tahun saja inflasi yang sempat mencapai 500% lebih menjelang jatuhnya pemerintahan Soekarno dapat ditekan hingga 1 digit dan pertumbuhan ekonomi meningkat, yang pada tahun 1980-an hingga 19897 sebelum krisis, Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 7%.

Dengan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, pendapatan per kapita meningkat, dan dengan didukung oleh berbagai kebijakan dan program terutama di bidang pendidikan,

pelayanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi pedesaan, jumlah anak yang tidak bisa membaca dan menulis berkurang secara signifikan; juga indikator-indikator sosial lainnya menunjukkan perbaikan yang sangat nyata. Pemerintahan orde baru juga bisa menjaga tingkat kesenjangan tidak meningkat, yang biasanya terjadi pada awal periode pembangunan. Selama 1970an-1980an, koefisien Gini tercatat sekitar 0,33 dan 0,34 di tahun 1990s dan tahun 2002 juga sekitar 0,34. Bahkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan mengalami perbaikan di daerah pedesaan selama pemerintahan Soeharto. Bukti empiris ini memberi kesan kuat bahwa relatif rendahnya tingkat kesenjangan pendapatan memperbesar efek positif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap pengurangan jumlah orang miskin selama periode orde baru. Namun demikian, perlu suatu pembuktian statistik mengenai suatu hubungan positif antara kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan tersebut juga memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan (yang diukur dari jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai suatu persentase dari jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun selama periode orde baru. Seperti yang ditunjukkan oleh statistik resmi, tingkat kemiskinan menurun secara signifikan dari 40% ke sekitar 11% selama 1976 – 1996 dan penurunan terbesar terjadi selama tahun 1970s hingga awal 1980s dengan 13 persentase poin, sedangkan selama periode 1981-

93 laju penurunannya hanya sekitar 16 persentase point. Sedangkan tingkat kemiskinan dan perubahannya bervariasi menurut propinsi, dan variasi ini disebabkan oleh perbedaan dalam banyak hal antar propinsi, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan sifatnya (apakah padat tenaga kerja atau modal), kondisi infrastruktur, pendidikan dan implementasi pada tingkat propinsi dari program atau kebijakan anti kemiskinan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, kemiskinan di sejumlah negara di Asia sebagai suatu perbandingan. Dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang laju penurunan kemiskinan per tahun cukup tinggi dibandingkan di negara-negara lain di tabel tersebut, sedangkan pada tahun 1960an Indonesia merupakan negara termiskin setelah Filipina dan Bangladesh. Ini menandakan bahwa usaha dari pemerintahan orde baru relatif sangat berhasil dalam mengurangi kemiskinan di dalam negeri.

Tentu hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang dialami Indonesia tersebut tidak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah suatu faktor yang sangat penting bagi penurunan kemiskinan, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebijakan-kebijakan yang "pro-kaum miskin" sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi mempunyai suatu dampak positif yang berarti bagi pengurangan kemiskinan, terutama

kebijakan-kebijakan yang produktif seperti perluasan akses bagi semua orang ke pendidikan, khususnya pendidikan 9 tahun seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini, dan pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan sektor pertanian dan ekonomi perdesaan.

Krisis ekonomi 1997/1998 membuat kemiskinan membesar kembali dengan laju yang tinggi dari 11,3% tahun 1996 ke 24,2% tahun 1998 yang dibarengi dengan penurunan PDB riil sebesar 13,4%. Juga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik cukup besar pada tahun 1998 yang menunjukkan bahwa krisis tersebut juga berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ada pihak yang diuntungkan dengan adanya krisis tersebut seperti pemilik-pemilik modal besar dalam dollar AS dan pemilik-pemilik perkebunan seperti di Sulawesi Selatan, dan ada pihak yang dirugikan seperti pekerja-pekerja yang kena PHK di pabrik-pabrik dan bank-bank yang bangkrut.

LPEM-FEUI (2004) pernah membuat suatu simulasi penurunan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan koefisien Gini yang berbeda hingga tahun 2010. Hasil simulasinya dapat dilihat di tabel 8, yang menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dapat tercapai jika laju pertumbuhan ekonomi (dY) meningkat dan pemerataan (dG) dapat diperbaiki. Menurut laporan tersebut walaupun terjadi *trade-off* antara penurunan kemiskinan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan,

sepanjang pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan peningkatan indeks ketidakmerataan (Gini) yang moderat masih dapat ditolelir.

Tabel 2.1 Simulasi Penurunan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Ketidakmerataan (Gini) yang berbeda hingga 2010.

Skenario dan Wilayah	Indeks HC							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Perkotaan								
Moderat (baseline)	15,01	13,19	12,41	10,70	8,97	7,39	6,02	4,87
dY = +1% dengan dG = 0	15,01	12,60	11,31	9,26	7,27	5,60	4,32	3,24
dY = -1% dengan dG = 0	15,01	13,52	12,95	11,42	9,86	8,46	7,17	6,02
dY = 0 dengan dG = +1%	15,01	13,80	13,03	11,32	9,60	8,01	6,63	5,47
dY = 0 dengan dG = -1%	15,01	12,58	11,80	10,08	8,35	6,77	5,41	4,27
dY = +1% dengan dG = -1%	15,01	11,99	10,70	8,64	6,65	4,98	3,71	2,64
dY = -1% dengan dG = +1%	15,01	14,13	13,57	12,04	10,48	9,08	7,79	6,62
Perdesaan								
Moderat (baseline)	17,72	16,42	16,06	13,67	11,29	9,27	7,60	6,15
dY = +1% dengan dG = 0	17,72	15,62	14,55	11,66	9,13	7,06	5,33	4,08
dY = -1% dengan dG = 0	17,72	16,85	16,80	14,73	12,55	10,63	9,01	7,59
dY = 0 dengan dG = +1%	17,72	16,89	16,54	14,15	11,78	9,74	8,06	6,59
dY = 0 dengan dG = -1%	17,72	15,95	15,58	13,19	10,81	8,79	7,14	5,70
dY = +1% dengan dG = -1%	17,72	15,15	14,08	11,18	8,64	6,58	4,87	3,64
dY = -1% dengan dG = +1%	17,72	17,32	17,28	15,21	13,03	11,11	9,47	8,03
Nasional								
Moderat (baseline)	16,58	15,06	14,52	12,42	10,32	8,48	6,93	5,61
dY = +1% dengan dG = 0	16,58	14,34	13,19	10,65	8,34	6,44	4,90	3,73
dY = -1% dengan dG = 0	16,58	15,45	15,18	13,33	11,41	9,72	8,23	6,92
dY = 0 dengan dG = +1%	16,58	15,61	15,08	12,98	10,88	9,04	7,48	6,14
dY = 0 dengan dG = -1%	16,58	14,51	13,97	11,86	9,75	7,92	6,39	5,18
dY = +1% dengan dG = -1%	16,58	13,79	12,63	10,08	7,78	5,88	4,36	3,20
dY = -1% dengan dG = +1%	16,58	16,00	15,74	11,98	11,98	10,27	8,78	7,45

Sumber : LPEM-FEUI (2004)

Jalur utama lewat mana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan adalah yang disebut efek kesempatan kerja dari perubahan output: jika output turun maka kesempatan kerja juga berkurang sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat yang selanjutnya jumlah orang miskin bertambah.

Horton dan Mazumdar (2001) dalam Tulus Tambunan (2006), misalnya menyimpulkan bahwa pendapatan dari kelompok miskin yang berkurang selama krisis ekonomi 1997/1998 tidak hanya disebabkan oleh tingkat upah riil yang menurun tetapi juga sebagai akibat dari tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Namun demikian, hubungan ini lebih berlaku di negara-negara maju dimana tidak ada apa yang disebut

pengangguran terselubung atau setengah pengangguran, yang di negara-negara miskin merupakan suatu fenomena yang riil dan bisa dijumpai di sektor informal yang terdiri dari berbagai macam kegiatan ekonomi tidak resmi, skala kecil dan berpenghasilan sangat rendah. Juga di Indonesia sektor informal sangat nyata yang selama periode krisis bersama dengan sektor pertanian telah berperan sebagai penampung akhir (*last resort*) bagi pekerja-pekerja yang terpaksa di PHK-kan di sektor formal akibat banyak perusahaan yang bangkrut atau tutup. Terutama di industri manufaktur, keuangan, transportasi dan konstruksi yang sangat terpukul oleh krisis tersebut. Inilah alasan kenapa peningkatan pengangguran terbuka di Indonesia selama periode krisis tersebut tidak terlalu dramatis seperti banyak orang waktu itu menduga, tetapi diiringi dengan suatu perpindahan yang signifikan ke sektor informal dan peningkatan pengangguran terselubung. Oleh karena itu, merupakan suatu perkiraan umum bahwa di Indonesia jumlah pengangguran (yakni pengangguran resmi versi pemerintah atau pengangguran terbuka, pengangguran tidak resmi atau terselubung atau setengah pengangguran) akan selalu lebih besar daripada pengangguran terbuka, selama sektor informal yang menyerap banyak pengangguran (atau yang sedang mencari pekerjaan) setiap tahun berkembang pesat.

Selain pertumbuhan ekonomi, dalam beberapa tahun belakangan ini, kelembagaan dan dampaknya terhadap kemiskinan merupakan suatu

itu penting di kalangan akademis maupun masyarakat secara umum. Terutama semakin disadari bahwa selain faktor-faktor produksi yang standar seperti modal, tenaga kerja, energi dan teknologi, kelembagaan juga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga sangat menentukan hasil yang dicapai dari proses pembangunan jangka panjang termasuk pengurangan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan.

Olson dan Kahkonen (2000) dan Picciotto (1995) dalam Tulus Tambunan (2006), menganggap pentingnya penggunaan pendekatan ekonomi kelembagaan dalam menganalisis efek dari pembangunan atau pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan.

Kata "kelembagaan" bisa luas cakupannya. Ini bisa mencakup ide-ide berbeda yang berkembang, seperti (a) kelembagaan sebagai suatu aturan main, (b) modal sosial, (c) governance, dan (d) tatanan sosial masyarakat sipil. Sebagai salah satu pemikiran teoritis yang maju, Ahsan (2001) meletakkan semua konsep tersebut di atas di dalam suatu gabungan kerangka kerja dimana konsep-konsep itu dapat diatur dan dijelaskan di dalam suatu tatanan hirarki sehingga semua komponen tersebut cocon sebagai kasus-kasus khusus (atau sub-sub kategori) dari ide-ide yang lebih umum. Hasil pengembangan kerangka kerja ini disebut sebuah kerangka kerja dari "modal kelembagaan" yang relevan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan efeknya terhadap kemiskinan.

Aron (1997) menjelaskan beberapa kelembagaan mencakup suatu rangkaian yang luas dari kualitas kelembagaan (misalnya penegakan hukum dan hak milik) stabilitas politik (misalnya, kerusuhan, pembunuhan/penculikan, pengambil-alihan kekuasaan dari pemerintah yang berkuasa secara paksa (*coups*), perang saudara); karakteristik-karakteristik dari regim politik (misalnya, pemilihan, undang-undang, struktur dan kekuasaan daripada eksekutif); modal sosial (seperti, besarnya kegiatan masyarakat dan organisasi sipil); dan karakteristik-karakteristik sosial (seperti etnis, agama, keragaman sejarah dan pendapatan).

Williamson (1996) mengklasifikasi lingkungan kelembagaan kedalam apa yang ia sebut realitas atau tingkat "makro" dan "mikro". Tingkat makro berurusan dengan ketentuan-ketentuan atau aturan main, atau keterbatasan-keterbatasan manusiawi yang menstruktur interaksi-interaksi politik, ekonomi dan sosial; keterbatasan-keterbatasan informal (yakni sangsi-sangsi pantangan-pantangan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, cara-cara pelaksanaan, dan peraturan-peraturan / ketentuan formal) undang-undang, hukum-hukum, hak-hak milik. Sedangkan, tingkat mikro berurusan dengan lembaga-lembaga *governance* seperti pasar, pasar kuasai, dan mode-mode hirarki dari pelaksanaan kontrak bisnis atau dari transaksi-transaksi dalam pelaksanaan manajemen. Kebanyakan

lembaga-lembaga lokal formal dan informal di daerah perdesaan di NSB bisa masuk ke dalam kategori mikro tersebut.

Gandhi (1998) membuat suatu studi berdasarkan suatu survei terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan pembangunan pertanian di India. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga biasanya terkandung di dalam lingkungan kelembagaan lokal dan mereka berinteraksi secara dinamis dengannya dibawah pengaruh dari struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik yang ada, dan hubungan-hubungan kultur dan kekuasaan. Beberapa lembaga menguntungkan kelompok miskin sementara yang lainnya merugikan (mendiskriminasikan orang miskin). Keberhasilan dari tindakan kolektif untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan pasar sering tergantung pada efektivitas dari lembaga-lembaga yang melayani kepentingan mereka. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh rumah tangga-rumah tangga mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya-sumber daya dan menciptakan pendapatan sering tergantung tidak hanya pada sumber daya-sumber daya yang mereka miliki tetapi juga pada lingkungan kelembagaan lokal.